

**KERJASAMA NUKLIR SIPIL AMERIKA-INDIA
MELALUI 123 AGREEMENT**

TESIS

**POPPIE ANGGREINY SALEH
0706190944**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN WILAYAH AMERIKA
JAKARTA
JULI 2009**

**KERJASAMA NUKLIR SIPIL AMERIKA-INDIA
MELALUI 123 AGREEMENTS**

TESIS
**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains**

POPPIE ANGGREINY SALEH
0706190944



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN WILAYAH AMERIKA
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Poppie Anggriny Saleh
NPM : 0706190944
Tanda Tangan :
Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Poppie Anggreiny Saleh
NPM : 0706190944
Program Studi : Kajian Wilayah Amerika
Judul Skripsi : KERJASAMA NUKLIR SIPIL
AMERIKA-INDIA MELALUI
123 AGREEMENT

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Siswanto ()
Penguji : Alfian Muthalib, M.Si (*Alfian Muthalib*)
Penguji : Ronny M. Bishry, Ph.D (*Ronny M. Bishry*)
Penguji : Dr. Nana Nurliana S ()
Penguji : Muhammad Fuad, M.A (*Muhammad Fuad*)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains, Program Studi Kajian Wilayah Amerika pada Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Siswanto, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam proses penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Alfian Muthalib, M.Si, selaku pembaca, yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Para dosen Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia (KWA UI);
- (4) Alm. Ayahanda ku tercinta Nasrun Saleh yang selalu memberikan motivasi dan semangat, sampai saat ini semuanya masih hangat dalam benakku. Ibunda ku tersayang, yang terus berjuang demi anak-anaknya meraih pendidikan;
- (5) Kakak dan Adekku Ninik, Eni, Ira Asti, terimakasih untuk semangat dan pengertiannya
- (6) Sahabatku Sari Dwi Mulyawaty yang telah banyak membantu “tanpa disadarinya” memberikan pandangan, ketegaran, kekuatan dan masukan yang membangun menyelesaikan semua persoalan termasuk tesis ini;
- (7) Teman-teman KWA UI, Khususnya Ibu Lena, terimakasih banyak untuk semangat yang luar biasa mendorong selesainya tesis ini, Staf Sekretariat KWA UI dan orang-orang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu saya dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu selanjutnya.

Jakarta, 15 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sabagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Poppie Anggreiny Saleh
NPM : 0706190944
Program Studi : Kajian Wilayah Amerika
Departemen : Program Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KERJASAMA NUKLIR SIPIL AMERIKA-INDIA
MELALUI 123 AGREEMENTS**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal :
Yang menyatakan

(Poppie Anggreiny Saleh)

ABSTRAK

Nama : Poppie Anggreiny Saleh
Program Studi : Kajian Wilayah Amerika
Judul : Kerjasama Nuklir Sipil Amerika-India Melalui 123 Agreement

Tesis ini membahas Kerjasama Nuklir Sipil Amerika-India melalui *123 Agreement*. Hal ini merupakan bentuk kebijakan pragmatis Amerika Serikat dalam pencapaian kepentingannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan nuklir sipil AS-India dalam *123 Agreement* merupakan bentuk kontrol terhadap perkembangan nuklir India. Perkembangan India dijadikan penyeimbang kekuatan bagi dominasi Cina di Kawasan Asia.

Kata kunci:

123 Agreement, Pragmatisme, Amerika Serikat, India, Cina

ABSTRACT

Name: : Poppie Anggreiny Saleh
Study Program: Kajian Wilayah Amerika
Title : Civil Nuclear Agreement between United States of America and India
in 123 Agreement

This thesis discusses Civil Nuclear Agreement between United States of America and India in 123 Agreement. It's a pragmatic policy of USA in achieving its interest. This research is a descriptive research and the result of the research shows that USA-India Civil Nuclear Agreement is a control that USA did over Indian Nuclear development. The development of India becomes the balance of China domination in Asian region.

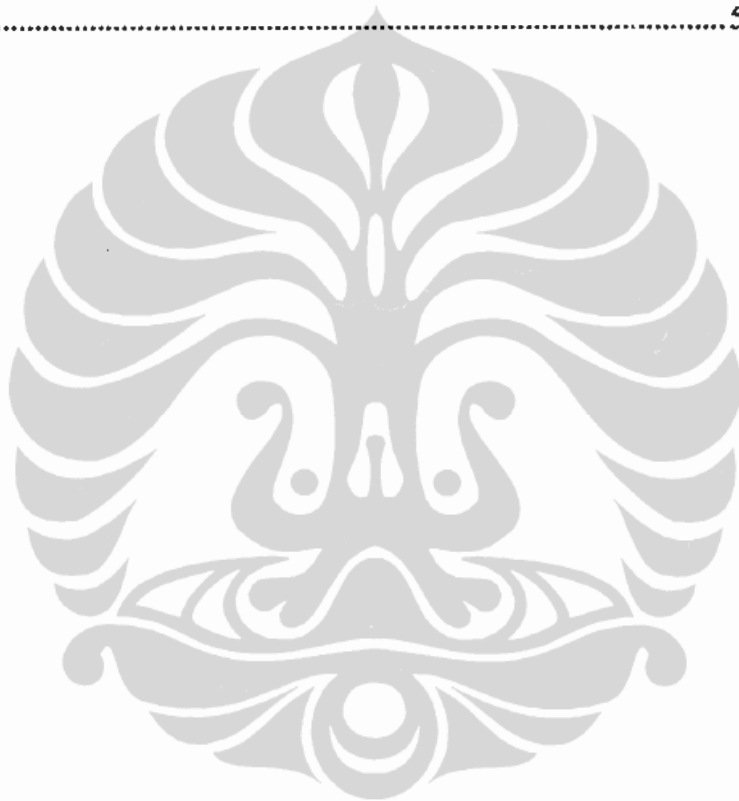
Key words:

123 Agreements, pragmatism, America, India and China

DAFTAR ISI

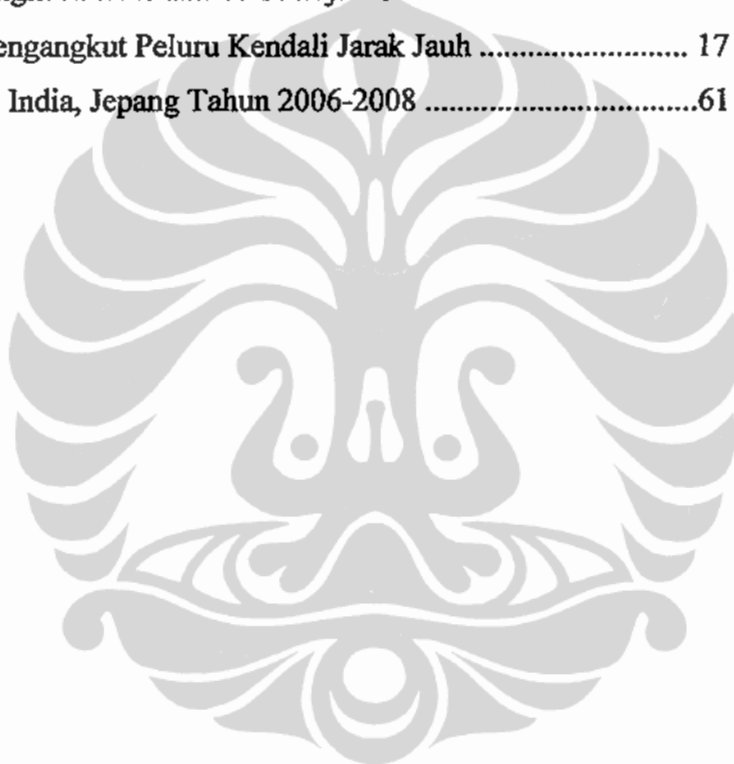
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Kerangka Teori	4
1.4 Hipotesis	9
1.5 Metodologi Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
Bab 2 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Perkembangan Nuklir	11
2.1 Nuklir Untuk Militer	12
2.2 Upaya Pembatasan Senjata Nuklir Untuk Sipil	18
2.2.1 <i>Strategic Arms Limited Talks I (SALT I)</i>	18
2.2.2 <i>Strategic Arms Reduction Treaty (START)</i>	18
2.2.3 <i>Strategic Arms Reduction Treaty (START)</i>	19
2.3 Nuklir Untuk Sipil	21
2.4 Non Proliferation Treaty (NPT)	24
Bab 3 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap India	32
3.1 Kepentingan Amerika Serikat di India	33
3.1.1 Politik dan Keamanan	37
3.1.2 Ekonomi	39
3.2 Perkembangan Nuklir di India	42
Bab 4 Arti Strategis 123 Agreement Bagi AS	50

4.1 Pragmatisme Amerika Serikat Terhadap India	55
4.2 India dan 123 Agreemnet	57
4.3 AS, India, dan Cina dalam 123 Agreement	59
4.3.1 Perkembangan Ekonomi Cina dan <i>123 Aggrement</i>	61
4.3.2 Hubungan Cina-India dan Posisi Amerika Serikat	67
Bab 5 Kesimpulan	70
Daftar Pustaka	73
Lampiran	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peluru Kendali Balistik Antar Benua (ICBM)	13
Tabel 2.2 Peluru Yang Diluncurkan Dari Kendali Kapal Selam/Kapal Laut.....	15
Tabel 2.3 Bom Nuklir, Slcm (<i>Sea Launched Cruised Missile</i>) Rudal Jelajah Dari Laut Dan Alcm (<i>Air Launched Cruised Missile</i>)Rudal Jelajah Dari Udara	16
Table 2.4 Pesawat Pengangkut Peluru Kendali Jelajah Udara	17
Table 2.5 Kapal Selam Pengangkut Peluru Kendali Jarak Jauh	17
Tabel 4.1 GDP AS, Cina, India, Jepang Tahun 2006-2008	61



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kepentingan AS di Asia Selatan dan khususnya pada India dalam kesepakatan “123 Agreement”. Kesepakatan ini merupakan persetujuan kesepakatan antara AS dan India dalam bidang nuklir sipil. Secara umum hubungan bilateral Amerika Serikat (AS)-India sejak kemerdekaan India dari Inggris sangat buruk. Salah satu faktor utamanya ketika India melakukan uji coba nuklirnya yang pertama ditahun 1974. Upaya perbaikan hubungan AS-India diawali tahun 1988, saat kunjungan utusan AB. Vajpayee (Perdana Menteri India saat itu), namun belum benar-benar berhasil. Barulah setelah kunjungan Vajpayee ke AS di tahun 1999 dan kunjungan balasan Presiden Clinton ditahun 2000 menjadikan hubungan India-AS lebih harmonis. Pada tanggal 10 Oktober 2008, AS-India menandatangani kerjasama nuklir sipil di Washington. Kesepakatan ini menandakan pentingnya posisi India sebagai negara kekuatan baru untuk pemenuhan “kepentingan” AS khususnya di Asia.

India selanjutnya menjadi negara penting bagi AS setelah Jepang dan Korea Selatan. Namun tidak hanya AS yang melihat potensi besar ini, negara lain seperti Rusia, Inggris dan China juga sangat berkepentingan dengan Asia Selatan khususnya India. India adalah aktor utama dikawasan Asia Selatan karena agama Hindu sangat mempengaruhi peta politik kawasan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan konflik yang pada akhirnya memunculkan negara baru seperti Pakistan dan Banglades. Perseteruan antara India – Pakistan mengakibatkan perlombaan nuklir sampai saat ini. Perkembangan teknologi nuklir India yang semakin pesat mendorong negara lain disekitar kawasan tersebut merasa terancam (khususnya Pakistan). Menurut Christina B. Rocca Asisten Luar Negeri AS untuk Asia Selatan, bahwa perkembangan sosial ekonomi, transformasi teknologi, dan persaingan nuklir antara India dan Pakistan membuat kawasan ini paling berbahaya.

Hal yang paling penting ialah ketika secara keseluruhan kita melihat kepentingan AS yang menjadikan India sebagai sekutu untuk menghadapi kekuatan Cina. Kemandirian Cina saat ini merupakan ancaman besar bagi AS. Isu pergantian mata uang dollar AS sebagai alat tukar internasional adalah ancaman besar bagi runtuhnya kapitalisme AS. AS harus lebih waspada lagi melihat pertumbuhan Cina. Tingginya pendapatan negara Cina juga turut menaikkan anggaran dalam militer. Kemandirian Cina dalam memperbaharui atau membuat persenjataan baru menjadikan modal dan aset masa depan. Perekonomian Cina akan semakin maju dengan keuntungan berbagai penjualan. Masyarakat dunia tidak lagi tergantung pada AS ataupun negara Eropa lainnya. Dibidang nuklir, Cina adalah salah satu negara yang berhak memiliki persenjataan nuklir. Otomatis AS tidak dapat mengecam begitu saja perkembangan nuklir Cina. Ancaman inilah yang mendorong AS bekerjasama dengan India, yang belum menandatangani NPT.

NPT adalah suatu perjanjian yang ditandatangani 1 Juli 1968 dan mulai berlaku sejak 5 Maret 1970, dengan maksud untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama yaitu nonproliferasi, perlucutan dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Perjanjian ini juga mengatur pengembangan teknologi untuk sipil, serta melarang negara NPT bekerja sama dengan negara non-NPT. Dan jika didasarkan perjanjian tersebut India tidak diwajibkan menerima tim investigasi IAEA (*International Atomic Energy Agency*/ Badan energi Atom Internasional) untuk mengawasi penggunaan dan pengembangan nuklir militer.

Kesepakatan nuklir sipil AS-India lebih dikenal dengan "*123 Agreement*". Pada mulanya yang menjadi permasalahan adalah India tidak menandatangani NPT (*Nuclear Proliferation Treaty*). Setelah pertemuan Bush dengan Singh tahun 2005, pemerintah AS kemudian membuat peraturan yang didasarkan pada *US Atomic Energi Act* (AEA) tahun 1954. Peraturan ini melegalkan AS bekerjasama dengan India dalam bidang nuklir sipil, Undang-undang ini dikenal dengan *Hyde Act*. Dalam *Hyde Act*, India harus menyetujui pengawasan dari IAEA. Pengawasan ini bagi AS agar dapat lebih mudah mengawasi dan mengontrol perkembangan nuklir khususnya di India, dan negara tetangga lain seperti

Pakistan, Cina dan Iran. Berhasilnya diplomasi Bush menjadikan India sebagai *stakeholder* NPT juga berarti membuka peluang bisnis AS di Asia Selatan.

1.2 Permasalahan

Berdasar latar belakang diatas penelitian ini akan meneliti kepentingan AS melalui kerjasama *123 Agreements* untuk mengontrol nuklir India dan sekaligus menghadapi kekuatan Cina. Pertumbuhan ekonomi India sangat cepat dan berada pada posisi kelima dunia menurut data CIA (*Central Intelligence Agency*) didalam *Gross Domestic Product* (GDP) sekitar US\$3,267 triliun (meskipun seperempat dari penduduk india masih hidup dibawah garis kemiskinan).¹ Perkembangan teknologi India sangat pesat, dan tingkat pendidikannya cukup tinggi dibandingkan negara lain dalam satu kawasan.² Letak geografis India yang berbatasan dengan Cina merupakan poin penting lainnya. Pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat tinggi, perkembangan teknologi telekomunikasi dan Informatika, pengembangan militer dan persenjataan, banyaknya jumlah tentara di Cina membuat kekhawatiran bagi AS. Saat ini Cina telah masuk kedalam perdagangan global, dengan tenaga kerja yang murah dan berlimpah menjadikan produksi barang Cina jauh lebih murah. Indikasinya adalah Cina sudah menjadi pemain penting dalam perekonomian dunia (nilai tukar mata uang Cina yang rendah juga memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan-perusahaan besar). Pertumbuhan yang pesat ini akan menjadi persoalan lebih lanjut ketika India dan Cina dapat bekerjasama secara "damai" membangun kekuatan di Asia khususnya. Persoalan berikut yang kemungkinan muncul ialah semakin berkurangnya peranan dan pengaruh AS di Asia. India muncul sebagai kekuatan regional utama, mempunyai senjata nuklir dan merupakan salah satu negara demokrasi liberal didunia. Hal ini lah yang menjadikan India sangat penting bagi AS.

¹CIA, "The World Factbook" dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html?countryName=India&countryCode=IN®ionCode=sas#IN>, diakses tanggal 8 Juni 2009.

²PDB ialah ukuran barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri oleh suatu negara selama satu periode tertentu. Perubahan PDB dari tahun satu ke tahun berikutnya adalah ukuran pertumbuhan ekonomi.

Pada tanggal 18 Juli 2005 Presiden Bush dan Perdana Menteri Singh bertemu untuk pertama kalinya dalam rangka *nuclear agreement* di Washington. Berdasarkan perjanjian ini AS harus menjamin teknologi dan bahan bakar reaktor-reaktor nuklir bagi India. Di AS kesepakatan ini awalnya menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian anggota *House of Representatif* (HoR) dan Senat, begitu juga dengan partai oposisi di India (partai komunis). Rusia dan Cina yang merasa khawatir dengan perjanjian ini juga menolak kesepakatan ini, karena melihat India bukanlah negara anggota NPT. Namun AS dan India tetap melanjutkan proses kesepakatan ini dan pada tanggal 10 Oktober 2008, kedua negara menandatangani 123 Agreement di Washington DC. Kesepakatan ini juga menunjukkan kelemahan posisi lembaga penting Internasional yang mengawasi nuklir internasional dan mencerminkan sikap pragmatisme AS. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Mengapa *123 Agreement* dipilih AS dalam mencegah perluasan pembangunan kekuatan nuklir India?
- Sejauh mana *123 Agreement* mendukung kepentingan AS di India dan Asia Selatan pada umumnya?

1.3 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini saya akan menggunakan teori pragmatisme dan teori kepentingan untuk menganalisis permasalahan diatas. Secara harfiah pragmatisme dijelaskan sebagai suatu ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu mengikuti tindakan. Minderop (2005) mengatakan bahwa dalam perkembangannya pragmatisme dan falsafah bangsa AS (liberalisme, individualisme, kapitalisme, demokrasi liberal) berjalan selaras dan menjadi landasan politiknya. Lebih lanjut Minderop menjelaskan "pragmatisme selalu didasarkan atas asas manfaat, dimana pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil" (teori pragmatisme benar jika berfungsi).³ Paham ini berkembang di AS sekitar abad ke-19 dan tumbuh menjadi suatu model pengambilan keputusan, model bertindak, dan model praktis AS dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Istilah pragmatisme sebenarnya diambil oleh C.S. Peirce dari Immanuel Kant. Kant mengartikannya dengan

"keyakinan-keyakinan hipotesa tertentu yang mencakup penggunaan suatu sarana yang merupakan kemungkinan real untuk mencapai tujuan tertentu".⁴ Namun istilah pragmatis itu sendiri diperkenalkan oleh Peirce dan dipopulerkan oleh William James. Lebih jauh Peirce mengatakan bahwa pragmatisme lebih pada suatu teori mengenai arti (*theory of meaning*) daripada teori kebenaran (*theory of the truth*). Menurut Copleston teori kebenaran Pierce diartikan bahwa suatu konsep harus diperhitungkan konsekuensi praktis yang akan terjadi karena konsekuensi mempengaruhi seluruh arti dan makna:

In order to ascertain the meaning of an intellectual conception one should consider what practical consequences might conceivably result by necessity from the truth of the conception; and the sum of these consequences will constitute the entire meaning of the conception... From this analysis it obviously follows that the meaning of an intellectual concept has a relation to conduct. For the conditional proposition in which the meaning is explicated are concerned with conduct (Albertin Minderop, 2005).⁵

Coplestone juga menggambarkan bahwa Pierce tidak menyarankan untuk memahami suatu arti atau makna harus selalu diikuti dengan tindakan. Sama halnya dengan penentuan kebenaran yang didasarkan verifikasi, karena tidak semua kebenaran harus dijawab dengan verifikasi. Pragmatisme sebagai *the theory of truth* tidak terlepas dari *theory of meaning*, sehingga untuk menentukan kebenaran dapat dijawab dengan tindakan atau pengalaman manusia. Menurut Horton dan Edwards dalam *American Literary Thought*, Pierce memformulasikan prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatisme yaitu:

1. bahwa kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih daripada kemurnian opini manusia.
2. bahwa apa yang dinamakan "universal" adalah opini-opini yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari "*community of knowers*".
3. bahwa filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membutuhkan bahwa masalah dan kesimpulan yang terdapat dalam filsafat

⁴ Mohammad Najib Abdullah, *Pragmatisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Intelektual Amerika*, (Universitas Sumatra Utara, 2004, diakses 23 Februari 2009); <http://library.usu.ac.id/download/fs/sejarah-mohammad.pdf>: Internet.

⁵ Albertine Mindrop, *Op.Cit.*, hal 48.

dan juga matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat (komunitas).⁶

Horton dan Edwards juga menulis bahwa William James mengajukan prinsip dasar pragmatisme sebagai berikut:

1. bahwa dunia tidak hanya terlihat menjadi spontan, berhenti dan tidak dapat diprediksi, tetapi dunia benar adanya.
2. bahwa kebenaran tidaklah melekat dalam ide-ide, tetapi sesuatu yang terjadi pada ide-ide dalam proses yang dipakai dalam situasi kehidupan nyata.
3. Bahwa manusia bebas untuk meyakini apa yang menjadi keinginannya untuk percaya akan dunia, sepanjang keyakinannya tidak berlawanan dengan pengalaman praktisnya maupun penguasaan ilmu pengetahuannya.
4. bahwa nilai akhir dari kebenaran tidak merupakan suatu titik ketentuan yang absolut tetapi semata-mata terletak dalam kekuasaannya mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lain tentang dunia dimana kita tinggal didalamnya.⁷

Pragmatisme yang muncul di AS terbentuk sebagai suatu model pengambilan keputusan, bertindak dan praktis AS. Bagi kaum Pragmatis untuk mengambil tindakan tertentu ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu dan yang *kedua* ialah tujuan dari tindakan itu sendiri dan Keduanya tidak dapat dipisahkan.⁸ Pragmatisme merupakan alat yang digunakan untuk mencapai manfaat yang didasari kepentingan manusia (bersifat konsisten karena selalu didasarkan manfaat), ketidak konsistennya terletak pada tindakan dan cara prilakukanya untuk mencapai kepentingan dengan berbagai pertimbangan. Suatu tindakan atau kebijakan dikatakan tidak pragmatis jika tidak bermanfaat. *123 Agreement* merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengimbangi dan lebih jauh lagi dapat mencegah perkembangan Cina.

⁶ Horton dan Edwards dalam Mohammad Najib Abdullah, *Op.Cit.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Mohammad Najib Abdullah, "Pragmatisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Intelektual Amerika" dalam <http://library.usu.ac.id/download/fs/sejarah-mohammad.pdf> ; Internet, diakses Tanggal 8 Desember 2009.

Kebijakan politik luar negeri suatu negara bertujuan mewujudkan kepentingan nasional/ *national interest*. Kepentingan nasional secara universal dikatakan oleh Hans Morgenthau sama halnya dengan dengan generalisasi pada konstitusi, yaitu kesejahteraan umum dan proses hak yang sama. Maknanya adalah masyarakat mencapai kesejahteraan dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan masyarakat dunia. Konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau (1966) didasarkan pada dua elemen ialah "the concept of national interest, then, contain two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances"(hal 147).

Kepentingan nasional yang utama dan wajib dicapai oleh pemerintah ialah memenuhi kebutuhan masyarakat, barulah setelah itu menyesuaikan kondisi keadaan sekitar. Maksud dari menyesuaikan kondisi disini adalah dalam pencapaian kepentingan nasional dapat dilakukan dengan cara damai (bekerjasama) ataupun konflik (perang) terlepas dari kelegalan ataupun moralitas. Pandangan ini menitikberatkan bahwa setiap individu/negara mempunyai kepentingan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan menjaga keamanan.

Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Kegley dan Wittkopf (2001). Konsep kepentingan nasional dijabarkan bahwasanya suatu negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, memiliki pertahanan dari ancaman agresi luar, dan dapat mempertahankan nilai-nilai maupun cara pandang hidup bangsanya "the state should promote the internal welfare of its citizens, provide for defence against external aggression, and preserve the state's values and way of life" (hal 147). Setiap negara (maupun individu) berhak mempertahankan kesejahteraan, dengan selalu meningkatkan keamanan negaranya. Tujuannya ingin memperoleh kekuatan atau kekuasaan (power) yang pada akhirnya digunakan lagi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Jika kita mengacu pada kepentingan nasional AS maka menurut John T Rourke, ada empat kepentingan nasional AS.⁹ Pertama, melindungi perdagangan (melihat AS adalah negara perdagangan), untuk menjaga kestabilan perdagangan maka diperlukan keamanan nasional. Situasi yang aman dapat meningkatkan

⁹ John T Rourke , ed *Talking Sides: Controversial Issues in American Foreign Policy*, (New York, McGraw-Hill, 2000).

kepercayaan pasar dan menumbuhkan investasi. Yang *kedua* ialah mempertahankan wilayah pengaruh, dalam hal ini diterjemahkan dalam "*Doktrin Monroe*" yang dititik beratkan pada tidak adanya pengaruh ataupun dominasi dari dunia lama (Inggris). Kepentingan nasional AS yang ketiga adalah *containment of communism* atau pembendungan komunis. Meskipun Uni Soviet telah runtuh dan sebagian negara pecahannya masuk dalam anggota NATO dan Uni Eropa namun masih ada negara yang berpaham komunis (Korea Utara dan Kuba) dan nilai-nilai dari paham komunis masih tetap ada dan sangat berlawanan dengan nilai-nilai AS. Cina walaupun masih menganggap dirinya komunis namun sebagian sistem (perekonomian nya) menganut sistem ekonomi pasar. Dan dalam hal kerjasama AS-India dalam *123 Agreement*, merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi perluasan pengaruh Cina. Kepentingan nasional AS yang *keempat* adalah *making the world like America* (membentuk dunia seperti AS), contohnya adalah Globalisasi, pasar bebas, demokrasi. Tujuan nya adalah membentuk AS sebagai negara contoh utama, negara yang perlu dicontoh, diajak kerjasama dan menjadi kiblat bagi bangsa-bangsa lain.

Kebijakan luar negeri AS menurut Walter A MacDougall (1997) terbentuk dari beberapa tradisi (bahwasanya tidak ada *single tradition* dalam kebijakan politik luar negeri AS). Ada dua tradisi diplomasi pertama (*old testament*) AS yang dibangun dan merepresentasikan *manifest of America The Promised Land* yakni; *liberty* atau *exceptionalism, unilateralism* atau *isolationism, the American system* atau *monroe doctrine*, dan *expansionism* atau *manifest destiny*. Tradisi kedua (*new testament*) yang membentuk *America the Crusader State*, ada empat yaitu *progressive imperialism, wilsonianism* atau *liberal internationalism, containment* (pertahanan) dan *global meliorism* yang secara sederhana diartikan sebagai bentuk ekspresi misi AS dalam sosial-ekonomi dan gelombang budaya politik AS dalam menjadikan dunia yang lebih baik.¹⁰ Asumsi ini didasarkan bahwasanya AS mampu (*can*), diperbolehkan (*should*) dan berkewajiban (*must*) menolong negara lain berbagi mimpi AS (*American Dream*). Dengan kerangka pemikiran inilah AS menerapkan kebijakan politik luar negeri (pencapaian

¹⁰ Walter A. McDougall, *Promised Land, Crusader State: The American Encounter with the World Since 1776*, (New York: Houghton Mifflin Company, 1997).

kepentingannya). Untuk mencapai kesepakatan, AS mengajukan beberapa persyaratan yang harus disepakati oleh India. Beberapa prasyaratnya ialah India harus menerima IAEA untuk mengawasi nuklir sipil di India, selain itu India tidak boleh mengolah kembali bahan bakar nuklir. Persyaratan ini adalah salah satu bentuk tindakan pragmatis untuk mencapai kepentingan nasional AS.

1.4 Hipotesa

Penandatanganan *123 Agreement* merupakan upaya kontrol terhadap perkembangan nuklir India yang diharapkan memberikan manfaat bagi AS sekaligus untuk mengimbangi dominasi Cina di Asia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yakni suatu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.¹¹ Penelitian ini menekankan pada kerjasama nuklir sipil AS-India dengan menggambarkan fakta dan data, serta memberikan penjelasan berdasarkan teori dan konsep yang dijadikan alat analisis. Kemudian hal itu diintrepetasikannya hingga sampai pada pengambilan kesimpulan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka seperti melalui jurnal, buku, internet, dan media untuk mendapatkan data yang lengkap, relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Pokok Masalah

1.3 Kerangka Teori

1.4 Hipotesis

1.5 Metodologi Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 2 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap

¹¹Rony Kontur, D.M.S, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PPM, 2004), hal 105.

Perkembangan Nuklir

2.1 Nuklir Untuk Militer

2.2 Upaya Pembatasan Senjata Nuklir Untuk Sipil

2.2.1 *Strategic Arms Limited Talks I (SALT I)*

2.2.2 *Strategic Arms Limited Talks II (SALT II)*

2.2.3 *Strategic Arms Reduction Treaty (START)*

2.3 Non Proliferation Treaty (NPT)

Bab 3 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap India

1.1 Kepentingan Amerika Serikat di India

1.2 Perkembangan Nuklir di India

Bab 4 Arti Strategis *123 Agreement* Bagi Amerika Serikat

4.1 Pragmatisme Amerika Serikat Terhadap India

4.2 India dan *123 Agreement*

4.3 AS, India, dan Cina dalam *123 Agreement*

4.3.1 Perkembangan Ekonomi Cina dan *123 Agreement*

4.3.2 Hubungan Cina-India dan Posisi Amerika Serikat

Bab 5 Kesimpulan

BAB 2

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERKEMBANGAN NUKLIR

Istilah nuklir lebih dikenal masyarakat umum pada era Perang Dunia II (PD-II). Pada tanggal 2 Agustus 1939, sebelum pecahnya PD-II, Albert Einstein mengirim surat kepada Presiden AS Franklin Delano Roosevelt (FDR) dan mengabarkan bahwa Nazi Jerman sedang melakukan pemurnian uranium-235 yang kemungkinan akan dikembangkan menjadi bom atom.¹ Dalam suratnya Einstein mengatakan bahwa Jerman menghentikan penjualan uranium dari Cekoslovakia dan mengambil alih tambang-tambangnya. Untuk itu AS diharapkan dapat lebih cepat mengembangkan bom nuklir sebelum Jerman.² Tindak lanjut dari surat Einstein pemerintah AS membuat suatu proyek nuklir besar yang dikenal dengan *Manhattan Project*. Proyek ini difokuskan pada pengembangan senjata nuklir untuk PD-II. Dalam kurun waktu enam tahun hasil nyata dari proyek ini berupa *bom trinity* yang merupakan bom pertama di dunia dan diuji di Alamogordo, New Mexico 16 Juli 1945. Hasil proyek ini digunakan pertama kali dalam peperangan untuk membom Hiroshima (*little boy*) dan Nagasaki (*Fat Man*) pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Era sebelum dan selama PD II pemanfaatan nuklir lebih difokuskan untuk persenjataan.³

Berakhirnya PD-II ditandai dengan dijatuhkannya bom ke Nagasaki dan Hiroshima dan munculnya era perang dingin AS-Uni Soviet. Pada masa ini nuklir (senjata) menjadi kunci untuk mempertahankan ideologi Barat dan Timur.

¹ Pada tahun 1938 Otto Hahn dan Fritz Strassman (ilmuwan Jerman) menemukan reaksi pembelahan inti atom. Penelitian dilakukan dengan cara menembaki unsur Uranium-235 (U-235) dengan partikel neutron yang bergerak sangat lambat. Hasilnya berupa inti-inti atom yang lebih kecil dan massanya lebih ringan dibandingkan dengan U-235. Dari proses ini kemudian dipancarkan dua hingga tiga buah partikel neutron baru yang bergerak sangat cepat (neutron cepat), hingga pada akhirnya dilepaskan energi dalam bentuk panas sebesar 200 MeV (Mega electron-Volt). Hasil reaksi ini sangat berbeda dengan reaksi kimia biasa saat itu. Reaksi pembelahan inti atom U-235 disebut dengan reaksi nuklir.

² U.S. Department of Energy, Office of History & Heritage Resources, "Einstein's Letter To Roosevelt", http://www.cfo.doe.gov/me70/manhattan/einstein_letter_photograph.htm, Internet: diakses 11 Maret 2009.

³ Little Boy dijatuhkan melalui pesawat pengebom B-29 Superfortress Enola Gay yang diterbangkan oleh Kolonel Paul Tibbets. Sedangkan Fat Man diangkut dengan pesawat B-29 Bockscar.

Sehingga pada era perang dingin AS dan Uni Soviet berlomba membangun kekuatan nuklir. Namun sejalan dengan hal tersebut perundingan mengenai pengurangan persenjataan khususnya nuklir (*disarmament/arms control*) dan aturan penggunaan nuklir juga berjalan. Selama masa perang dingin terjadi beberapa kesepakatan dimulai dari PTBT (*Partial Test Ban Treaty*, 1963), *Outer Space Treaty* (1967), NPT, ABM (*Anti-Ballistic Missile Treaty*, 1972) SALT I (1972), *Threshold Test Ban Treaty* (1974) dan SALT II (*Strategic Arms Limited Talks*, 1979), START I (*Strategic Arms Reduction Treaty*) dan SORT (*The Treaty On Strategic Offensive Reduction*) antara AS dan Uni Soviet.

2.1 Nuklir untuk Militer

Perubahan kebijakan strategi keamanan AS setelah 11 September 2001 mengalami perubahan. Presiden Bush saat itu memerintahkan Departemen Pertahanan untuk menata kembali sistem militer AS termasuk penekanan pada penggunaan senjata nuklir (perubahan strategi dalam peraturan penyerangan nuklir baik itu dalam strategi pencegahan ataupun dalam *blue print* untuk strategi pengambilan sikap). Pada *Nuclear Posture Review* (peninjauan posisi nuklir) Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan dikatakan bahwa terdapat tiga rangkaian baru (*a new triad*) yang diubah yaitu:⁴

1. *offensive strike system/* sistem penyerangan (nuclear and non-nuclear)
2. *Defences/* pertahanan, (aktif dan pasif)
3. *a revitalized defense infrastructure that will provide new capability in a timely fashion to meet emerging threats.* revitalisasi infrastruktur pertahanan (kemampuan mutakhir) dalam menghadapi ancaman.

Perubahan kebijakan ini ditujukan guna mempersempit perluasan terorisme nuklir. Menteri Pertahanan AS, Donald H Rumsfeld memandang persenjataan seperti *intercontinental ballistic missiles* (ICBMs), *submarine-launched ballistic missile* (SLBMs), dan bom/persenjataan nuklir memainkan peranan penting. Sehingga *new triad* pertama dimaksudkan bahwa persenjataan baik itu non-nuklir maupun senjata nuklir diperlukan untuk memperkuat pertahanan keamanan AS

⁴ H. Donald Rumsfeld "Nuclear Posture Review Report", dalam <http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm>; Internet, 2 Mei 2009.

sekaligus mencegah penyerangan. *New triad*, yang kedua dimaksudkan untuk pengembangan dan perluasan secara aktif dan pasif dalam pertahanan. Yang ketiga dalam hal regenerasi persenjataan dalam menghadapi perubahan sesuai dengan situasi yang terjadi nantinya. Tujuan yang ketiga ini adalah untuk mempertahankan diri dari musuh dan kompetisi persenjataan nuklir.

New Triad bertujuan untuk menurunkan ketergantungan pada senjata nuklir dan meningkatkan kemampuan AS dalam menghalangi penyerangan (perkembangan *weapon mass destruction/WMD*) dengan dua cara:

1. meningkatkan pertahanan (secara bersama-sama)
2. dan jumlah *non-nuclear strike forces*, termasuk menghapuskan senjata konvensional dan informasi pengoperasian. Hal ini dimaksudkan agar nantinya AS akan mengurangi ketergantungan pada persenjataan khususnya nuklir.

Meskipun penyeruan AS agar negara-negara didunia mengurangi persenjataan nuklir, AS tetap mempunyai pertahanan yang cukup besar dan lengkap. Berikut adalah kekuatan persenjataan nuklir AS berdasarkan *Center for Defense Information* tahun 2006:

Tabel 2.1
Peluru Kendali Balistik Antar Benua (ICBM)

ICBM (Inter Continental Ballistic Missile)					
Nama	Mulai digunakan	Jangkauan (Km)	Jumlah Total	Hulu-ledak	keterangan
LGM-30G Minuteman III MK12	1970	13,000	150	170	150 Hulu ledak aktif Hulu ledak aktif type W62
LGM-30G Minuteman III MK12 (MIRV)	1970	13,000	50	170x3 MIRV	150 hulu ledak aktif dan 15 cadangan Hulu ledak aktif type W62 akan diganti dengan hulu ledak tunggal pada tahun 2007

LGM-30G Minuteman III MK12A	1979	11,300	300	335x3 MIRV	750 hulu ledak aktif dengan 30 cadangan Hulu ledak type W78 akan digantikan dengan hulu ledak tunggal pada tahun 2007
LGM-118MX Peacekeeper	1986	9,600-11,000	10	300x3 MIRV	100 hulu ledak aktif Hulu ledak type W87 ditarik Oktober 2005. Penggantinya belum diketahui.

Sumber: "Kekuatan Persenjataan Nuklir" AS, <http://www.irwan.net/content/view/31/1/>; Internet, diakses tanggal 30 Juni 2009.

Berdasarkan data diatas Amerika Serikat sampai saat data ini dicatat (2005) memiliki kurang lebih 510 Rudal balistik dengan total sekitar 1100 hulu ledak aktif (*warhead*) dan 45 hulu ledak cadangan, dengan jarak jangkauan antara 9,600km hingga 13,000km.

Tabel 2.2

Peluru Yang Diluncurkan Dari Kendali Kapal Selam/Kapal Laut

SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile)					
Nama	Mulai Digunakan	Jangkauan (Km)	Jumlah Total	Hulu Ledak (Kt)	Keterangan
UGM-96A Trident II C-4	1979	7,400	40	100x6 MIRV	288 Hulu ledak aktif Seri ini digantikan oleh Trident II D-5 pada tahun 2006
UGM-133A Trident II D-5 MK4	1992	12,000	288	100x8 MIRV	1,344 hulu ledak aktif dan 150 cadangan Jumlah Trident II D-5 adalah 288 unit. Dari unit tersebut yang dirubah menjadi Trident II D-5 MK4 tidak diketahui.
UGM-133A Trident II D-5 MK5	1990	12,000	288	455x6 MIRV	384 hulu ledak aktif dengan 20 hulu ledak cadangan Hulu ledak type W78

Sumber: "Kekuatan Persenjataan Nuklir" AS, <http://www.irwan.net/content/view/31/1/>; Internet, diakses tanggal 30 Juni 2009.

Peluru yang diluncurkan dari Kendali Kapal Selam/Kapal Laut yaitu :SLBM (Submarines Launched Ballistic Missile) dan FBM (Fleet Ballistic Missile).

Berdasarkan data diatas, Amerika Serikat sampai saat data ini dicatat (2005) memiliki kurang lebih 328 Rudal Balistik yang dapat diluncurkan dari kapal selam atau kapal perang dengan total sekitar 3014 hulu ledak aktif (war head) dan 170 hulu ledak cadangan dengan jarak jangkau 7,400km hingga 12,000km (dari posisi kapal selam/kapal perang) yang menggusung rudal tersebut. Selain persenjataan peluru kendali balistik, Amerika Serikat juga memiliki jenis persenjataan nuklir lain seperti bom nuklir, peluru kendali yang diluncurkan dari laut (SLCM: Sea-Launched Cruised Missile) dan peluru kendali penjelajah yang diluncurkan dari udara (ALCM: Air-Launched Cruised Missile).

Tabel 2.3

Bom Nuklir, Slcm (*Sea Launched Cruised Missile*) Rudal Jelajah Dari Laut Dan
Alcm (*Air Launched Cruised Missile*) Rudal Jelajah Dari Udara

ICBM (Inter Continental Ballistic Missile)					
Nama	Mulai Digunakan	Jangkauan (Km)	Jumlah Total	Hulu Ledak (Kt)	Keterangan
B61 Mod-7	1967	classifieds	750	10 500	Bom nuklir ini diusung oleh pesawat pembom B-2A Spirit
B61 Mod-II	1997	classifieds	classifieds	0,3 180	Bom nuklir ini diusung oleh pesawat pembom B-2A Spirit dengan kelebihan daya tembus yang tinggi
B83	1984	2,500	650	1,000 2,000	Bom nuklir ini diusung oleh pesawat pembom B-2A Spirit
BGM-109A Tomahawk	1984	2,500	325	200	SLCM dengan hulu ledak aktif type W80-0 yang dapat diusung oleh kapal selam kelas Los Angeles atau kapal perang
AGM-86B	1982	2,500	950	200	ALCM dengan hulu ledak aktif type W80-1 yang dapat diusung oleh pesawat pembom B52H Stratofortress
AGM-129A ACM	1991	3,000	460	200	ALCM dengan hulu ledak aktif type W80-1 yang dapat diusung oleh pesawat pembom B52H Stratofortress

Sumber: "Kekuatan Persenjataan Nuklir" AS, <http://www.irwan.net/content/view/31/1/>; Internet, diakses tanggal 30 Juni 2009.

Selain memiliki peluru kendali balistik jarak jauh yang dapat diluncurkan dari dataran Amerika maupun armada kapal selam maupun kapal laut, Amerika Serikat juga memiliki peluru kendali balistik yang dapat diluncurkan dari pesawat pembom.

Table 2.4

Pesawat Pengangkut Peluru Kendali Jelajah Udara

Aircraft Bomber (pesawat pembom)					
Nama	Mulai Digunakan	Jangkauan (Km)	Jumlah Total	Hulu Ledak (Kt)	Ket
B52H Stratofortress	1961	16,000	94	20 ALCM atau ACM	
B52A Spirit	1993	12,000	20	16 B61 Mod 7 B61 Mod 11 atau Bom B82	

Sumber: "Kekuatan Persenjataan Nuklir" AS, <http://www.irwan.net/content/view/31/1/>; Internet, diakses tanggal 30 Juni 2009.

Berdasarkan data diatas, Amerika Serikat memiliki 114 Pesawat pembom jarak jauh yang mampu terbang sejauh 12,000km hingga 16,000km dan mengangkut 7 hingga 20 peluru kendali jelajah udara.

Table 2.5

Kapal Selam Pengangkut Peluru Kendali Jarak Jauh

Submarines (kapal selam)				
Nama	Mulai Digunakan	Jumlah Total	Hulu Ledak (Kt)	Ket.
Ohio Class	1981	14 (10 masih dalam pembuatan)	20 UGM 96A Trident I C-4 atau UGM 133A Trident II D-5	

Sumber: "Kekuatan Persenjataan Nuklir" AS, <http://www.irwan.net/content/view/31/1/>; Internet, diakses tanggal 30 Juni 2009.

Berdasarkan data diatas, Amerika Serikat memiliki 14 (atau nantinya 24) kapal selam nuklir pengangkut peluru kendali balistik.

Selain persenjataan peluru kendali balistik, Amerika Serikat juga memiliki jenis persenjataan nuklir lain seperti bom nuklir, peluru kendali yang diluncurkan dari laut (SLCM: Sea-Launched Cruised Missile) dan peluru kendali penjelajah yang diluncurkan dari udara (ALCM: Air-Launched Cruised Missile).

2.2 Upaya Pembatasan Senjata Nuklir

Perkembangan persaingan senjata nuklir dapat membahayakan dan menghancurkan dunia. Pembatasan penggunaan senjata nuklir AS dan Uni Soviet

kemudian dilakukan melalui kesepakatan internasional. Tidak hanya terbatas pada kedua negara besar saat itu, kesepakatan juga diberlakukan untuk negara-negara lain agar menghentikan persaingan, pembuatan, percobaan dan ruang gerak senjata nuklir diantara negara-negara didunia. Berikut beberapa perjanjian Internasional yang pernah terjadi:

2.2.1 *Strategic Arms Limited Talks I (SALT I)*

SALT I (Persetujuan Pembatasan Senjata Strategis) adalah perundingan perjanjian pertama antara AS dan Uni Soviet yang dilakukan dari bulan November 1969 hingga bulan Mei 1972. Selama periode tersebut AS dan Uni Soviet berunding mengenai kesepakatan pembatasan dan pengendalian persenjataan (pembatasan pembangunan dan membekukan sistem ABM / *Anti-Balistic Missile System*). Pada mulanya upaya penghentian ini tidak berhasil dilaksanakan. SALT 1 (1972) merupakan perjanjian yang ditujukan agar negara pemilik senjata (AS dan Uni Soviet) nuklir mengurangi dan pada akhirnya menghapuskan senjata nuklir secara bertahap. Perjanjian STAR I menyebutkan bahwa AS dan Rusia harus mengurangi hulu ledak nya sebanyak enam ribu (perjanjian ini ditandatangani kedua negara tahun 1990. berdasarkan ratifikasi tahun 1994 oleh Parlemen Duma, SALT I akan berakhir tahun 2009 ini.

2.2.2 *Strategic Arms Limited Talks II (SALT II)*

Negosiasi SALT II dimulai sejak bulan November 1972, dengan agenda untuk menyusun kembali kesepakatan sebelumnya. Bagi AS kesepakatan SALT II ditujukan untuk mensejajarkan strategi nuklir agar kesejahteraan terjaga (tidak terjadi instabilitas). Pada bulan November 1974, Presiden Ford dan Brezhnev (Sekjen Partai Komunis Uni Soviet) mengadakan pertemuan di Vladivostok untuk membuat draf/kerangka kesepakatan SALT II. Dan pada tanggal 18 Juni 1979 SALT II ditandatangani di Wina, Austria oleh Jimmy Carter (Amerika Serikat) dan Leonid Brezhnev (Uni Soviet). Namun pada tanggal 3 Januari 1980, Presiden Carter meminta Senat (yang sedang meratifikasi SALT II) untuk

menunda ratifikasi karena invansi Uni Soviet ke Afganistan.⁵ Meskipun Uni Soviet akhirnya mematuhi kesepakatan yang belum diratifikasi, namun hal ini tidak berlangsung lama karena ditahun 1984 dan 1985 Presiden Reagan menyatakan bahwa Uni Soviet telah melanggar komitmen politik dalam perjanjian SALT II.

Pada tanggal 26 Mei 1986, Presiden Reagan meninjau kembali status AS dan memberikan laporan pada Kongres bahwasannya Uni Soviet tidak mentaati komitmen politik dalam SALT I dan SALT II dan tidak ada indikasi dari Uni Soviet untuk melakukan pengendalian bersama. Berdasarkan hal ini Reagan menyatakan bahwa kedepannya nanti AS akan menyesuaikan sendiri standar kekuatannya tanpa mempertimbangan kesepakatan SALT.⁶ SALT II berisi mengenai kesepakatan untuk membatasi peluncuran nuklir, peluncuran rudal-rudal MIRV (*Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle*), pesawat pembom pengangkut rudal penjelajah jarak menengah, hulu ledak pada ICBM (*intercontinental ballistic missile*), larangan percobaan ICBM baru.⁷ SALT II tidak pernah diratifikasi kembali oleh senat AS.

2.2.3 *Strategic Arms Reduction Treaty (START)*

START I (persetujuan pengurangan senjata strategis) merupakan hasil dari politik dua jalur Reagan, dimana perjanjian ini berisi mengenai kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir berdaya jarak menengah.⁸ Negosiasi START I dimulai tahun 1982, namun akhir tahun 1983 Uni Soviet mengajukan protes pada pemerintah AS mengenai milisi nuklir di Eropa Barat. STRAT (persetujuan pengurangan senjata strategis) pemusnahan nuklir dengan daya luncur berjarak menengah adalah upaya untuk meredakan ketegangan/ kecemasan masyarakat internasional. Realisasi dari perundingan ini dilakukan tahun 1982 dengan

⁵ Dibawah konstitusi AS, perjanjian memerlukan pengesahan setidaknya 2/3 suara Senat. Dan kebanyakan anggota Senat saat itu ragu dan mempersoalkan apakah perjanjian SALT II dapat melindungi kepentingan AS.

⁶ "SALT II", <http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/salt2-1.html>: Internet: diakses tanggal 24 April 2009.

⁷ M Edy Sentosa, "meminimalkan senjata" http://theglobalgenerations.blogspot.com/2008/05/meminimalkan-senjata_10.html

⁸ Ibid.

ditandatanganinya perjanjian SART (*strategic arms reduction treaty*). Persetujuan ini mengurangi jumlah peluru kendali jarak menengah.

Negosiasi nuklir tetap dilanjutkan setelah keruntuhan Uni Soviet dengan negara "pewaris" persenjataan Uni Soviet (Belarus, Ukraina, Rusia dan Kazakhtan). START I ditandatangani tahun 1991 dan diratifikasi oleh Senat AS tahun 1992 dimana berisi tahap pengurangan dan batasan *nuclear warheads* (hidung peledak senjata nuklir) hingga 6.000. START II ditandatangani oleh Rusia dan AS tahun 1993 dan disetujui oleh Senat AS tahun 1994 dan *Rusisian Duma* April 2000. Isi dari kesepakatan ini ialah mengurangi penyebaran *nuclear warheads* hingga dibawah 3500 setiap negaranya. Dan kerangka kesepakatan START III AS-Russia yakni ingin menurunkan penyebaran *nuclear warheads* agar tidak lebih dari 1000.

Setelah berakhirnya PD-II pemanfaatan nuklir tidak hanya terfokus pada persenjataan namun juga digunakan untuk kebutuhan sipil secara damai. Arah kebijakan nuklir AS juga berubah. Pada tahun 1991 Presiden AS, George H.W.Bush, mengurangi jumlah senjata nuklir yang dimiliki AS. hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategi nuklir diantaranya:

1. berakhirnya perlombaan senjata dengan Uni Soviet, sehingga perlu adanya pereda ketegangan dengan memusnahkan sebagian senjata nuklir.
2. PD II adalah perang dunia terakhir, karena sudah terwujudnya negara hegemoni yang menjaga *balance of power*, dengan negara lain di dunia.
3. memengaruhi pemimpin negara-negara bekas Uni Soviet untuk ikut mereduksi persenjataannya.⁹

Nuklir merupakan hal yang prestise khususnya bagi negara-negara besar. Pada masa ini perkembangan teknologi semakin maju, dan beberapa negara mulai melakukan penelitian terhadap persenjataan nuklir. Sehingga mulai bermunculan negara-negara nuklir baru. Nuklir tidak hanya ingin dimiliki negara-negara besar dan kaya, tetapi juga negara berkembang (dunia ketiga). Hadirnya negara nuklir baru ini membuat masyarakat internasional khawatir akan adanya perlombaan

⁹ Andrew Butfoy, "The Future of Nuclear strategy" dalam top 10 artikel, menguak Keberadaan Strategi Nuklir pada Situasi Multipolar, http://strategy-class-top.blogspot.com/2009/01/menguak-keberadaan-strategi-nuklir-pada.html#_ftn4: Internet, diakses 18 Maret 2009.

senjata nuklir. Untuk menjaga dan mengawasi pengembangan penggunaan nuklir (uranium) maka dibentuk organisasi IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dan kesepakatan perjanjian penggunaan nuklir dalam NPT. Kesepakatan mengenai pengendalian maupun pengurangan persenjataan lebih jelasnya lihat dalam lampiran 1.

2.3 Nuklir Untuk Sipil

Pengembangan energi nuklir sipil seperti reaktor nuklir untuk pembangkit daya dimulai secara intensif setelah berlangsungnya konferensi Genewa "*on the peaceful uses of atomic energy*" tahun 1955. Yang dimaksudkan dengan nuklir sipil ialah pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan sipil (pemanfaatan nuklir untuk memenuhi kebutuhan manusia) bukan di bidang militer. Seperti yang telah dijelaskan diatas, pemanfaatan nuklir tidak terbatas untuk senjata saja. Yang menjadi persoalan ialah ketika adanya penyalahgunaan program nuklir sipil untuk tujuan persenjataan nuklir. Secara ilmiah proses menciptakan energi listrik dan senjata nuklir adalah sama (berbahan dasar yang sama). Bahan bakar nuklir untuk pembangkit tenaga listrik dapat dikumpulkan lagi dan diproses kembali menjadi bahan yang bisa digunakan untuk senjata nuklir. Akibatnya pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai selalu bisa berubah untuk tujuan perang (senjata).

Namun, menurut Patric Moore, PhD (salah satu pendiri Greenpeace), energi nuklir merupakan salah satu pilihan alternatif energi yang bersih. Dalam *Congressional Subcommittee on Nuclear Energy* tanggal 28 April 2005 ia menyampaikan pandangannya "Nuclear energy is the only non-greenhouse gas emitting power source that can effectively replace fossil fuels and satisfy global demand".¹⁰ (energi nuklir adalah satu-satunya sumber listrik yang tidak memancarkan gas rumah-kaca, yang secara efektif dapat mengganti bahan bakar fosil, untuk memenuhi permintaan energi yang semakin bertambah). Lebih jauh ia menggambarkan bahwa nuklir akan mengurangi ketergantungan masyarakat

¹⁰Dr. Patrick Moore, PhD, "Statement to Congressional Subcommittee on Nuclear Energy",

<http://www.greenspiritstrategies.com/D127.cfm>,: Internet, diakses tanggal 18 Maret 2009.

Internasional pada bahan bakar fosil. Sudah banyak penelitian nuklir yang dilakukan para ahli dan menyatakan nuklir layak menjadi sumber pengganti.¹¹

Hal yang perlu diperhatikan ialah sistem keamanan pengolahan, maupun pembuangan agar tidak berdampak buruk bagi manusia dan alam. Ada beberapa keuntungan menggunakan nuklir. Bahan bakar seperti minyak atau batu bara (bahan bakar fosil) akan bereaksi bila bertemu dengan oksigen dan umumnya hanya dapat digunakan satu kali. Bahan bakar fosil juga menimbulkan efek seperti emisi karbon, polusi, perubahan iklim dan meningkatnya temperatur bumi, kenaikan permukaan air laut, musim kering yang berkepanjangan. Berbeda dengan bahan bakar nuklir yang dapat terus menyala dalam peralatan fasilitas khusus yaitu reaktor nuklir. Bahan bakar nuklir juga dapat digunakan beberapa kali sebagai bahan bakar lewat proses kembali menjadi berkadar tinggi. Jumlah energi yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan bahan bakar fosil.¹²

Kebutuhan energi AS terus meningkat, dan AS harus lebih cerdas mensiasati kebutuhan yang terus meningkat tanpa mengabaikan kebersihan lingkungan. Energi erat kaitannya dengan politik, ekonomi dan keamanan. Dalam pidato Bush di Pennsylvania 25 Mei 2006 ia mengatakan: *for the sake of economic security and national security, the United State of America must aggressively move forward with the construction of nuclear power plants.*¹³ Demi kepentingan keamanan ekonomi dan keamanan nasional, AS harus secara aktif membangun PLTN baru. Lebih lanjut Bush juga menyerukan untuk tetap mempertahankan perekonomian, dengan menggunakan energi nuklir yang murah, bersih dan aman. Membangun PLTN saat ini diperuntukan untuk generasi masa depan, dimana mereka akan memiliki Amerika yang lebih baik. Nuklir merupakan

¹¹ Ibid. James Lovelock : penemu teori Gaia dan ilmuwan atmosfer (hypothesizer), percaya bahwa energi nuklir adalah satu-satunya energi yang menghindari perubahan iklim yang membahayakan. Steward Brand: pendiri *The whole Earth Catalogue* dan pemikir ekologi holistik, mengatakan bahwa gerakan lingkungan haruslah merangkul energi nuklir untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Bishop Hugh Montefiore (Alm): direktur dan pendiri *Friends of the Earth* Inggris membuat artikel pro-nuklir yang mengakibatkan pemaksaan pengunduran diri dari jabatannya.

¹² 1kg Uranium dapat menghasilkan 50.000 kWh (3.500.000 kWh dengan beberapa proses) energi, sedangkan 1 kg batubara atau 1 kg minyak hanya menghasilkan 3 kWh dan 4 kWh.

¹³ "President Discusses Energy During Visit to Nuclear Generating Station in Pennsylvania", <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/05/text/20060524-5.html>: Internet, 23 Maret 2009.

kunci dari masa depan energi yang aman dan bersih. Dan untuk menjaga kepemimpinan ekonomi dan memperkuat keamanan energi diperlukan nuklir. Di AS sudah 20% listrik menggunakan tenaga nuklir dan akan terus ditingkatkan. Dalam pidato tanggal 21 Januari 2006, presiden Bush mengakui ketergantungan AS pada minyak (bahan bakar fosil) dan ia mencanangkan penggantian BBM impor dari Timur Tengah, sebanyak 75% paling lambat tahun 2025.

....Breakthroughs on this and other new technologies will help us reach another great goal: to replace more than 75 percent of our oil imports from the middle east by 2025. By applying the talent and technology of America, this country can dramatically improve our environment, move beyond a petroleum based economy and make our dependence on Middle Eastern oil a thing of the past.¹⁴

Perencanaan energi alternatif bagi AS juga disampaikan oleh Obama dalam kampanyenya pada tanggal 3 Agustus 2008. Obama menggambarkan AS menghadapi tantangan besar, yaitu ketergantungan AS akan minyak. Ketergantungan ini akan mengancam keamanan nasional, Bumi dan perekonomian AS. Menurut Obama selama beberapa dekade, Washington gagal menyelesaikan persoalan ini. Hal ini disebabkan karena sikap memihak, adanya pengaruh tertentu, dan para politisi yang menggunakan cara licik untuk memenangkan pemilu (padahal hal tersebut bukanlah solusi jangka panjang yang akan AS dapatkan untuk kemandirian energi):

America has always risen to great challenges, and our dependence on oil is one of the greatest we have ever faced. It's threat to our national security, our planet and our economy. For decades, Washington has failed to solve this problem because of partisanship, the undue influence of special interests, and politicians who would rather propose gimmicks to get them

¹⁴ The Washington Post, "President Bush's State of the Union Address", http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/31/AR2006013101468_pf.html: Internet, Diakses Tanggal 21 Maret 2009.

through an election instead of long-term solutions that will get America closer to energy independence¹⁵

Dalam buku *The Whake and The Reactor*, Langdon Winner mengungkapkan bahwa seringkali keputusan yang diambil mengenai teknologi kebanyakan merupakan keputusan-keputusan politik. Amerika menyadari bahwa pentingnya menguasai teknologi nuklir untuk pemanfaatan sipil. Cadangan bahan bakar fosil yang terus berkurang, meningkatnya penggunaan listrik, dan pemanfaatan nuklir sebagai energi alternatif yang murah merupakan salah satu alasan AS melakukan kerjasama dengan India. Di wilayah Asia khusus nya Cina dan India Program PLTN berkembang pesat. AS juga menyadari bangkitnya India menjadi suatu kekuatan baru yang perlu diperhitungkan (khusus nya nuklir). Kerjasama nuklir sipil antara AS dan India juga menjadi kekhawatiran banyak negara khususnya negara sekitar India yaitu Pakistan dan Cina.

2.4 Nuclear non-Poliferation Treaty (NPT)

NPT merupakan suatu traktat/ perjanjian larangan pengembangan (penyebaran) senjata nuklir. Traktat ini ditetapkan oleh sidang Majelis Umum PBB tanggal 12 Juni 1968 dan ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia pada tanggal 1 juli 1968.¹⁶ Namun implementasinya (efektif) baru dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1970. Saat ini NPT beranggotakan 189 negara termasuk Indonesia, dan hanya 5 negara yang diijinkan memiliki senjata nuklir yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China (*nation weapon state/ NWS*). Kelima negara ini sekaligus merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB (*United Nation Secitivity Council*). Sementara itu terdapat 4 negara yang tidak menandatangani NPT yaitu Israel, Korea Utara (pernah menandatangani namun menarik kembali perjanjian tersebut pada tanggal 10 Januari 2003), Pakistan dan India. Negara non-NPT tidak menginginkan pembatasan pengembangan nuklir mereka, selain itu pengawasan dari IAEA adalah "mata-mata" bagi teknologi nuklir mereka. Dalam kesepakatan kerjasama nuklir sipil AS-India, India tetap tidak masuk dalam NPT namun, India

¹⁵ Obama Biden, "Barack Obama and Joe Biden: New energy for America" dalam http://www.barackobama.com/pdf/factsheet_energy_speech_080308.pdf. Internet, diakses tanggal 29 Juni 2009.

¹⁶ Finlandia merupakan negara pertama yang menandatangani NPT.

harus menerima IAEA sebagai salah satu syarat *123 Agreement* untuk pengawasan pengembangan nuklir sipil di India. Pengawasan ini merupakan satu alat kontrol AS dalam mengawasi perkembangan nuklir khususnya di India.

Tujuan dasar NPT ialah membatasi (mencegah) peningkatan jumlah negara yang memiliki kemampuan senjata nuklir. Setelah berakhirnya PD II banyak negara-negara lain melakukan uji coba senjata nuklir (tahun 1960 Perancis dan Cina melakukan uji coba senjata nuklir). Mengingat efeknya yang dapat membawa kehancuran manusia dan dunia, maka rancangan NPT dibuat setelah negosiasi antara AS dan Uni Soviet. Dalam NPT terdapat tiga pilar utama yaitu: Non-Poliferasi, Pelucutan (*disarmament*), dan hak untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.¹⁷

a. Non-Poliferasi

Yang dimaksudkan dengan non-Poliferasi yaitu mencegah penyebaran/perluasan penggunaan senjata nuklir pada negara-negara lain (negara-negara baru). Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa negara pemilik senjata nuklir (*nation weapon state*) dilarang mentransfer informasi, atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada "negara non senjata nuklir" dalam memperoleh kemampuan senjata nuklir. Negara non senjata nuklir dilarang mengembangkan, merakit, melakukan uji coba ataupun memperoleh senjata nuklir. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 dan 2.

Articel I: Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices. **Article 2:** Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or

¹⁷ <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/PDF/nptPrepCom.pdf>

other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.¹⁸

Negara-negara yang termasuk anggota NPT harus memenuhi kewajibannya seperti menerima inspeksi (diawasi) IAEA. Fungsi IAEA ialah mengawasi penggunaan nuklir secara damai sehingga tidak ada penyimpangan penggunaan nuklir.

Article 3 "Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. ..."¹⁹

b. Pelucutan

Untuk meredakan ketegangan dunia internasional NWS diharapkan akan mengurangi, membatasi penggunaan senjata nuklir, dan mengirimkan hasil produksi senjata nuklir ke negara lain (melakukan perjanjian dengan negara lain untuk menggunakan senjata nuklir). Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional NWS diharapkan dapat menghentikan produksi senjata nuklir, melucuti persenjataannya, dan melakukan langkah-langkah yang efektif guna menghentikan perlombaan senjata diantar negara lain. Semua tindakan tersebut secara tegas dan efektif dibawah pengawasan internasional dengan cara negosiasi.

Article VI: Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of

¹⁸ Departement for Disarmament Affairs, United Nations, "The Treaty On The Non-Poliferation Of Nuclear Weapons", <http://www.un.org/events/npt2005/npttreaty.html>, Internet, diakses 13 Maret 2009.

¹⁹ *Ibid.*

the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.²⁰

Setiap negara yang menandatangani NPT juga mempunyai hak/kedaulatan untuk menarik diri dari traktat ini jika dirasakan adanya suatu ancaman. Setelah 25 tahun NPT akan ditinjau kembali, dan akan diputuskan bahwa traktat ini akan berlaku selamanya atau akan diperpanjang dalam suatu periode tertentu. Nantinya keputusan didasarkan pada suara terbanyak (pasal 5, ayat 2).

Article X: 1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. ... ; *2.* Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty²¹

c. Hak untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai
Selain persenjataan, nuklir juga memiliki berbagai manfaat lainnya seperti bidang kedokteran dan kesehatan, PLTN (Pembangkit Listrik tenaga Nuklir), makanan, obat-obatan, industri, transportasi dan desalinasi air.²² Nuklir juga diyakini sebagai salah satu energi pengganti. Untuk itu kebanyakan negara tidak mau melepaskan kepemilikan bahan bakar nuklir. Dalam NPT diatur cara penggunaan, perdagangan Uranium/ tenaga nuklir secara damai. Perdagangan ini dilakukan secara internasional, sekaligus juga mengawasi adanya perdagangan nuklir di pasar gelap. Setiap negara anggota NTP harus berusaha menjalankan peraturan,

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Sidik Permana, "Pemanfaatan energi Nuklir dan Isu Kekinian," <http://www.pnij.org/index.php/content/view/full/84/411>, : Internet, di akses tanggal 16 Maret 2009. (Dalam bidang makanan, nuklir dimanfaatkan untuk rekayasa pertanian dan peternakan. Untuk transportasi (setelah melalui proses khusus, dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar). Pemanfaatan reaktor nuklir berskala kecil untuk kendaraan telah dilakukan untuk keperluan eksplorasi di daerah terisolir seperti di kutub oleh pemerintah Rusia sekitar tahun 1950an, namun tidak dilakukan untuk keperluan yang komersil. Selain itu nuklir juga di gunakan untuk menggerakkan mesin kapal selam).

dan mempunyai hak untuk menukar peralatan, bahan, ilmu dan teknologi informasi secara damai tanpa adanya diskriminasi (legitimasi hak dalam pengembangan nuklir damai untuk pembangunan nasional anggota NPT). NPT bertugas sebagai rambu dalam pemanfaatan nuklir secara damai. Seperti yang tertulis dalam traktat NPT:

Article IV: Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty....²³

Untuk mengawasi perkembangan aktifitas nuklir maka diperlukan badan internasional yang berwenang mengawasi/ mengontrol perkembangan nuklir. PBB

IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional) adalah salah satu organisasi internasional, dan agen PBB yang diharapkan dapat menjaga kestabilan dan keamanan internasional dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan nuklir secara damai.²⁴ Gagasan pendirian organisasi ini diusulkan pertama kali oleh Eisenhower dalam sidang umum PBB ke-8 bulan Desember 1953. Pada tahun 1956, rancangan IAEA ditandatangani oleh 81 negara.²⁵ IAEA resmi berdiri pada tanggal 29 Juli 1957 dan berpusat Wina, Austria. Pelaksanaan kegiatan IAEA didasarkan pada tiga pilar sesuai dengan statutenya yaitu: *safeguards and verification, safety and security, dan science and technology*.²⁶ Berdasarkan pilar tersebut IAEA melakukan pengamanan dan pengawasan nuklir (membantu pelucutan senjata dunia dan senjata pembunuh masal), melakukan kerjasama Internasional antar negara guna mempromosikan pemanfaatan energi nuklir untuk

²³ Department for Disarmament Affairs, *Op.Cit.*

²⁴ IAEA bukanlah badan PBB secara resmi namun organisasi ini turut membantu mempromosikan kebijakan PBB. Hubungan IAEA dan PBB diatur oleh perjanjian khusus, lihat <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infocircs/Other/infcirc11.pdf>.

²⁵ IAEA dipimpin oleh seorang Direkur Jendral, Dr. Mohamed ElBaradel dari Mesir. Ia membawahi enam unit utama yaitu; 1. *Department of Technical Cooperation*, 2. *Department of Nuclear Energy*, 3. *Department of Nuclear Safety and Security*, 4. *Department of Management*, 5. *Department of Nuclear sciences and Application*, 6. *Department of Safeguards*. Setiap unit dipimpin oleh seorang *Deputy Director General (DDG)*. Sekretariat IAEA memiliki staf profesional dan pendukung sebanyak 2200 orang dari lebih 90 negara anggota.

²⁶ "The Atoms for Peace", <http://www.iaea.org/About/index.html>; Internet, diakses 16 Maret 2009.

maksud damai dengan meningkatkan keselamatan dan pengamanan nuklir dari resiko dan bahaya yang mungkin timbul. IAEA juga membantu negara anggotanya dalam memanfaatkan teknologi nuklir secara damai untuk kepentingan sosial ekonomi.

Pada pilar pertama *verifikasi* dan *safeguard* terhadap program nuklir dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam suatu konvensi (*NPT, Treaty of Tlatelolco, Treaty of Bangkok, Treaty of Pelindaba, dan Treaty of Rarotonga*). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan sifat damai program nuklir suatu negara. IAEA tidak hanya menjamin kegiatan dan bahan nuklir yang dideklarasikan (*declared material and activities*) tidak dialihkan (*diversion*) menjadi senjata nuklir namun juga menjamin bahwa tidak ada kegiatan dan bahan nuklir yang tidak dideklarasikan (*undeclared nuclear materials and activities*).²⁷ Selanjutnya IAEA akan melakukan inspeksi, dan monitoring agar tidak ada penyalahgunaan untuk tujuan militer. Penguasaan teknologi nuklir merupakan hal yang sangat strategis bagi setiap negara. Penelitian pemanfaatan nuklir sebagai energi pengganti yang cukup menjanjikan, membuat kebanyakan negara ingin menguasainya. Nuklir juga dijadikan pertimbangan kekuasaan bagi negara yang menguasainya.

Dalam pilar kedua, IAEA membantu negara-negara meningkatkan pengamanan dan keselamatan nuklir terhadap radiasi, pengangkutan, dan pengolahan limbah. Organisasi ini juga harus memastikan bahwa kegiatan nuklir di dunia dilaksanakan dengan tingkat keselamatan yang tinggi (*highest levels of safety*) dan sesuai dengan standar keselamatan nuklir. IAEA juga memfokuskan perhatian pada masalah manajemen dan pembuangan bahan bakar bekas nuklir (*spent nuclear fuel*). Dalam pengamanan nuklir (*nuclear security*) difokuskan pada pencegahan, mendeteksi dan merespon berbagai tindakan yang berbahaya ataupun dalam bentuk kerjasama. Kerjasama internasional ini sangat penting untuk memperkuat kemampuan nasional sekaligus juga mengembangkan jaringan regional dan global untuk pengamanan nuklir. IAEA mengklasifikasikan potensi

²⁷ Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), "Press Release: Dalam Rangka Menyambut Kunjungan Dirjen IAEA ke Indonesia tanggal 7-9 Desember 2009", http://serpong6.batan.go.id/bkhh/BagianHumas/SiaranPers/Tahun2006/siaranpers_elbaradei_2006.htm, :Internat, 18 Maret 2009.

bahaya pengamanan nuklir menjadi 4 yaitu: bahaya pencurian senjata nuklir, perolehan bahan nuklir untuk pengembangan alat peledak nuklir, penyalahgunaan sumber radio aktif (*dirty bombs*), bahaya radiologi akibat serangan atau sabotase terhadap fasilitas pengangkut bahan nuklir.²⁸

Kegiatan IAEA dalam pilar ketiga ialah membantu negara-negara anggota memobilisasi ilmu dan teknologi (iptek) nuklir secara damai. Pemanfaatan iptek nuklir meliputi dua aplikasi, yaitu *non-power applications* dan *power applications*. *Non-power applications* mengembangkan aplikasi di bidang industri, medis, pertanian dan pangan, dan pengolahan sumber air bersih. *Nuclear power applications*, dimana IAEA berperan mendukung kerjasama internasional diantara negara-negara anggotanya khususnya dalam pengembangan dan penggunaan energi nuklir secara damai termasuk pembangkit tenaga listrik (*generating electricity*). Hal ini diakibatkan karena semakin meningkatnya kebutuhan energi global. IAEA menyediakan bantuan teknik negara-negara yang ingin mengembangkan energi nuklir nya, termasuk negara yang baru akan memulai. Bagi negara-negara yang baru memulai program nuklirnya, IAEA memberikan bantuan berupa perencanaan dan pembangunan prasarana PLTN, termasuk sumber dana dan daya manusia, penyediaan tenaga ahli, perlindungan radiasi, ganti rugi dan asuransi, prasarana fisik, kerangka hukum dan peraturan, verifikasi non-proliferasi dan pengamanan fisik, partisipasi masyarakat dan dukungan *stakeholders*.²⁹ Bagi AS, kedudukan IAEA dapat menjadi pengontrol, pengawas/pemantau sehingga dapat melihat perkembangan nuklir suatu negara. Secara tidak langsung AS dapat melihat kekuatan nuklir dan mengontrol agar kekuatannya tidak membahayakan kepentingan AS, melalui badan Internasional IAEA (persoalan kepentingan negara-negara penguasa nuklir dan yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut mengakibatkan pecahnya suara dalam IAEA. Dalam pemilihan ketua IAEA, AS sangat berkepentingan untuk menyelamatkan kepentingannya. EL Baradei terdahulu adalah pejabat IAEA biasa, namun atas usaha dan bantuan AS Baderai menduduki jabatan ketua. Namun AS pada

²⁸IAEA, "Nuclear Safety and Security", <http://www-ns.iaea.org/> : Internet, diakses 18 Maret 2009.

²⁹ BATAN, *Op.Cit.*

akhirnya tidak puas dengan hasil kerja dari Baderai karena menentang perang di Irak. Akibatnya AS menginginkan Baderai mundur dari jabatannya. Dukungan negara berkembang, menjadikan Baderai tetap memegang jabatannya hingga bulan November 2009 nanti). Dari hal ini kita dapat melihat peranan AS dalam mengamankan kepentingan nasionalnya. Penting bagi AS untuk memegang IAEA sebagai badan yang dapat mengawasi perkembangan nuklir negara lain.



BAB 3

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDIA

Kedudukan Asia Selatan, khususnya India semakin penting bagi Amerika Serikat (AS) semenjak abad ke-21. Semenjak kunjungan Bill Clinton ditahun 2000 hubungan AS-India mulai membaik dan di tahun 2004, Washington dan New Delhi telah menyusun suatu strategi bersama "*strategic partnership*", yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan supremasi hukum.¹ Saat masih menjabat menjadi Senator, Obama mengatakan ia mendukung penuh hubungan kerjasama antara AS-India, khususnya mengenai isu energi. McCain juga menegaskan bahwa AS mempunyai kepentingan dalam kesuksesan india ("*vested interest in india's sucses*"), ia menyebutkan bahwa kerjasama ini dapat memperbaiki militer, menghalangi/mencegah perluasan terorisme. Upaya bersama ini untuk memperkuat demokrasi dan keamanan energi.²

Kebutuhan energi suatu negara sangat mempengaruhi kebijakan baik itu politik, ekonomi dan keamanan dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa energi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Energi merupakan kebutuhan primer, tanpa energi yang mencukupi, perekonomian secara otomatis akan berjalan lambat, dan pada akhirnya mempengaruhi politik, sosial budaya hingga pertahanan dan keamanan. Energi erat kaitannya dengan kestabilan nasional suatu negara. Krisis Energi dunia akibat penambahan jumlah penduduk, dan semakin berkurangnya cadangan khususnya bahan bakar fosil menjadikan energi semakin penting. Kepentingan energi seringkali mengakibatkan konflik yang kompleks. Sampai saat ini AS masih menjadi konsumen energi minyak terbesar di dunia. Untuk mengatasi ketergantungan AS pada energi khususnya dari fosil maka AS mengembangkan PLTN sendiri. Keuntungan dari energi nuklir terletak pada besarnya energi yang dihasilkan dari reaksi pembelahan. Namun karena masih terbatasnya PLTN di AS sedangkan kebutuhan industri AS dan jumlah penduduk

¹ K.Alan Kronstadt, "CRS Report For Congress: India-U.S. Relations", Update 12 Agustus 2008 dalam , <http://www.usembassy.it/pdf/other/RL33529.pdf>; Internet; Diakses Tanggal 20 Mei 2009.

² Ibid.

yang semakin meningkat membuat AS masih menggunakan minyak sebagai sumber utama energi. Saat ini sudah 25% (104 PLTN) kebutuhan energi AS berasal dari nuklir. Hingga tahun 2030 AS merencanakan pembangunan listrik tenaga nuklir sebanyak 25-30 buah. White House mengatakan ketergantungan AS pada energi minyak akan mengurangi keamanan nasional dan dapat mendatangkan bencana:

The energy challenges our country faces are severe and have gone unaddressed for far too long. Our addiction to foreign oil doesn't just undermine our national security and wreak havoc on our environment -- it cripples our economy and strains the budgets of working families all across America.

Besarnya pengaruh energi dalam aspek kehidupan bernegara membuat AS menjalin kerjasama nuklir sipil dengan India.

3.1 Kepentingan Amerika di India

Tidak dapat di lepaskan bahwa kepentingan AS khususnya Asia Selatan dikaitkan dengan senjata nuklir dan sering kali dikaitkan dengan terorisme. Perseteruan antara Pakistan dan India pada akhirnya menciptakan koalisi diantara negara-negara besar yang memiliki kemampuan nuklir. Dukungan AS terhadap India, membuat Pakistan mencari dukungan dari Cina. Kondisi Pakistan membuat AS meningkatkan kewaspadaannya. Mantan Direktur Intelijen Nasional AS, John Negroponte memperkirakan bahwasannya Al Qaeda adalah ancaman teroris paling serius terhadap AS, dan pusat jaringan itu berada di Pakistan. Negroponte mengatakan kelompok teroris memelihara hubungan keseluruhan penjuror yang dilancarkan dari tempat persembunyian yang aman di Pakistan, kelompok-kelompok Timur Tengah, Afrika Utara dan Eropa. Osama juga diperkirakan bersembunyi didaerah perbatasan Afganistan-Pakistan.³ Untuk itu bagi AS perlu adanya pengawasan demi keamanan negaranya. Dalam buku laporan *Independent Task Force*, India yang memiliki satu juta lebih penduduk, dengan sistem

³ BBC News, "Al-Qaeda 'Rebuilding' in Pakistan", dalam http://ncws.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6254375.stm Update Jumat 12 January 2007; Internet, Diakses Tanggal 24 Mei 2009.

demokrasi, sistem pertahanan yang besar, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, menjadikan partner yang besar. Kekuatan ekonomi dan pertahanan yang semakin kuat menjadikan peran India penting di samudra hindia maupun wilayah Asia secara keseluruhan. Kerjasama dengan India merupakan peluang AS untuk memenuhi kepentingan AS.

Penandatanganan kesepakatan nuklir sipil antara AS-India mengakhiri ketegangan antara kedua negara selama 34 tahun. Selama perang dingin hubungan AS dan India sangat buruk karena adanya persaingan kepentingan antara Inggris dan AS di India. Masuknya India sebagai salah satu pencetus gerakan *Non-Block* sekitar tahun 1955 semakin memperparah hubungan kedua negara. Saat itu Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa sikap Nihro (India) tidak bermoral. Pemicu lainnya yang semakin memburuk keadaan ini ialah mengenai persenjataan nuklir. Setelah terjadinya perang antara Cina dan India (perselisihan ideologi Uni Soviet dan Cina), Inggris membuka jalur kerjasama India dan Uni Soviet. Pada saat itu terjadi kesepakatan mengenai persenjataan, maupun produksi barang jadi antar kedua negara (saat ini tujuan utama Inggris agar Uni Soviet mau membela India dari Cina dan AS). Pada akhirnya AS pun membuka kerjasama dengan Pakistan untuk pertahanan diri dari Uni Soviet. Setelah berakhirnya perang dingin perselisihan di antara negara-negara tersebut mulai berkurang dan periode baru bagi hubungan AS dan India. Setelah kemerdekaan India 1947, pengaruh AS mulai masuk ke India walaupun tidak begitu berhasil. Sampai saat kunjungan agen Vajpayee tahun 1988 setelah kekalahan partai kongres (dari Inggris), partai terbesar kedua yang memerintah hampir selama 50 tahun kemerdekaan.

Kunjungan pertama Vajpayee ke AS selama periode hubungan AS-India dikatakan oleh juru bicara resmi Departemen Luar Negeri AS yang menggambarkan kunjungan tersebut dengan berkata: "dan bagi kita yang telah mengikuti hubungan AS-India pada 4 dekade terakhir, kunjungan itu merupakan sebuah perubahan arus dan perubahan tersebut memiliki arah yang tepat".⁴ Dan Clinton juga berkata " Saya dengan Vajpayee telah bekerja keras bersama-sama dalam memindahkan hubungan dari hubungan yang miskin dengan kontak dan

⁴ O. Solihin, "Analisis Politik" dalam <http://osolihin.wordpress.com/2007/10/31/analisis-politik/>; Internet, diakses tanggal 28 Juni 2009.

penuh curiga, beralih kepada sebuah upaya nyata untuk membangun sebuah kemitraan jangka panjang yang merupakan keinginan dari rakyat India dan juga rakyat AS. Saya berbesar hati dan sangat menghargai upaya Perdana Menteri Vajpayee yang telah memberikan arah pada terjadinya transformasi ini ”.⁵

Upaya AS dalam membantu pertumbuhan ekonomi di India juga dilakukan melalui badan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Bagi India IMF berperan sangat besar dalam peningkatan ekonominya. Simon Saragih dalam pendahuluan buku ”India: Bangkitnya Raksasa Baru Asia” menggambarkan pada masa pemerintahan Indira Gandhi awal tahun 1980an, India mendapat pinjaman dari IMF karena lonjakan harga minyak dunia. Pada saat itu India berhasil mengembalikan hutang luar negerinya. Latar belakang pinjaman asing tersebut dilakukan untuk menumbuhkan investasi. Perubahan perekonomian yang dilakukan IMF dilaksanakan dengan cara privatisasi perusahaan, penurunan harga barang dan pajak, pengurangan regulasi pemerintah terutama perdagangan internasional. Liberalisasi perekonomian India sebenarnya tidak begitu mudah karena sejak tahun 1960an hingga 1991 pertumbuhan perekonomian India tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namun setelah tahun 1997 perekonomian India mulai bangkit dengan adanya model perekonomian Nehru. Peranan India di WTO juga merupakan faktor lainnya untuk memberikan kesempatan perluasan pasar.

Lebih lanjut Simon mengatakan bahwa terdapat dua sektor perekonomian India yang tumbuh sendiri (karena kurangnya campur tangan pemerintah) yaitu teknologi Industri dan perfilman Bollywood. India kemudian merubah pola pembangunan ekonominya berdasarkan kekuatan pasar dan investasi asing. IG Patel dan Manmohan Singh yang mengubah hal tersebut berdasarkan keinginan Indira Gandhi, kemudian dilanjutkan Narasimha Rao dan Ravij Gandhi. Dalam koran *The Wall Street Journal*, digambarkan bahwa perusahaan *high-tech* tumbuh dengan baik sekaligus menyingkirkan campur tangan para birokrat dan pemerintah. Dari daftar sepuluh perusahaan terbesar India, tiga produsen piranti lunak dan teknologi informasi menempati posisi puncak. Dengan membangun kekuatan ekonomi yang berbasis TI, India memulai dengan mendidik tenaga ahli. Pemerintah India mengirimkan ribuan pemuda India untuk memperdalam TI di

⁵ Ibid. Disini juga diterangkan pada saat itu terjadi kesepakatan investasi sebesar US \$7 miliar.

AS dan Eropa. Setelah mereka memperoleh keahlian banyak dari mereka bekerja di Lembah Silikon (terbentang dari San Francisco hingga San Yose). Dari 150.000 tenaga asing disana, 60.000 adalah pakar software dari India (pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narasimha Rao banyak para tenaga ahli ini dipulangkan ke India).⁶ Pada tanggal 26 April 2005, *House of Representatif* (HoR) AS mengeluarkan resolusi berisi penghormatan terhadap penduduk AS berkebangsaan India. Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk pengakuan AS dan juga pengumuman bagi dunia mengenai kekuatan teknologi India khususnya TI.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Nicholas Burns (2007), AS perlu membangun kerjasama dengan India baik itu dibidang politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi serangan teroris dan kejahatan yang terorganisir. Harapannya dengan gabungan dua kekuatan ini akan menimbulkan kestabilan, perdamaian dan kemakmuran dalam komunitas global. Tantangan globalisasi (obat-obatan terlarang, perdagangan perempuan dan anak-anak, perubahan iklim, terorisme dan senjata pemusnah masal) membuat AS berpikir bahwa perlunya aliansi global dengan negara-negara lain seperti India (Brazil, Indonesia dan Afrika Selatan). Pada tahun 2001, Presiden Bush mengakui pentingnya India dalam politik global dan menginginkan kedua negara bekerjasama dibidang nuklir sipil, *civilian space program*, perdagangan teknologi (*high technology*) dan pertahanan missile.

Setelah empat dekade Washington dan New Delhi aktif membangun kerjasama, AS harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:⁷

- a. ease restriction on cooperation in civilian satellite sector,
- b. treat India as a "friendly" country in granting export licenses for sale of defence equipment.
- c. ease restriction on the export to India of dual-use items that have civilian and military uses; and

⁶Yuni Ikawati, *Membangun Kekuatan Ekonomi dari Lembah Silikon dalam India Bangkitnya Raksasa Baru Asia: Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Maret 2007), 36-37.

⁷ Frank G. Wisner H, Nicholas Platt, Marshall M. Bouton, "New Priorities in South Asia :U.S Policy Toward India, Pakistan and Afganistan", Council on Foreign Relation and the Asia Society, (New York; 2003). Halaman 4.

- d. encourage U.S foundation, businesses and scientific and educational institution to expand effort to develop cooperative programs with India counterparts

Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan juga pertahanan India dengan tujuannya untuk membentuk imaji keunggulan/kebesaran India didunia dan Asia pada khususnya. Stimulus ini juga ditujukan untuk mengikatkan perekonomian India, agar negara ini mampu membeli bahan dan teknologi nuklir AS (saat ini fungsi nuklir sebagai senjata militer semakin berkurang dan sudah banyak berperan dalam menumbuhkan perekonomian AS).

Pada saat kunjungan Condoleezza Rice ke India bulan Maret 2005, ia menegaskan bahwa AS akan membantu menyeimbangkan hubungan India-Pakistan "we would effectively "de-hyphenate" our South Asia policy by seeking highly individual relation with India-Pakistan". Lebih lanjut Rice mengatakan bahwa AS akan "mematahkan" peraturan nonpoliferasi yang berlaku selama ini (negara anggota NPT tidak boleh bekerjasama dengan negara lain yang bukan anggota NPT) dan akan mendukung India secara penuh dalam kerjasama energi nuklir sipil (Burns, 2007).

Dalam jangka waktu sembilan bulan, kongres menandatangani *Hyde Act* untuk mendukung program nuklir sipil AS-India. Kebijakan ini merupakan pergeseran perubahan pemikiran global AS terhadap India, dari sebuah negara yang di"asingkan" karena nonpoliferasi menjadi negara sekutu (*stakeholder*). Untuk pertama kalinya selama tiga dekade terakhir, India akan menyerahkan semua program nuklir sipil kepada badan inspeksi internasional IAEA. Hal ini berarti AS dapat lebih mudah mengawasi perkembangan nuklir di India. AS memberikan suatu penilaian kepada masyarakat dunia bahwa AS peduli terhadap India (Burns 2007).

3.1.1 Politik dan Keamanan

Energi mempunyai peranan sangat besar dalam menjaga keamanan nasional. Sistem pengamanan, aktivitas militer (menjalankan peralatan perang), semuanya memerlukan energi/ bahan bakar. Bukanlah hal yang aneh jika pemerintah AS selalu menitik beratkan kemandirian energi AS. Negara yang menguasai energi

dapat menguasai dunia. Upaya AS dalam mencari energi alternatif diwujudkan dalam kerjasama *123 Agreement*, disisi lain kerjasama nuklir sipil dalam *123 Agreement* mempermudah pengawasan AS terhadap perkembangan nuklir di India. Kemampuan nuklir India saat ini, dapat memicu perlombaan senjata (nuklir) di Asia khususnya Pakistan. Untuk itu harus adanya pengendalian salah satunya melalui kesepakatan Internasional/ hukum Internasional. Namun Pakistan dan India tidak mau menandatangani NPT, untuk itu harus ada mekanisme lain untuk mengendalikan gejolak ini. Dalam buku *Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower* (2002) yang ditulis William Blum, bekas pejabat Departemen Luar Negeri Amerika, ia menjelaskan bahwa intervensi AS ke berbagai penjuru dunia, di antaranya bertujuan menguatkan Amerika sebagai satu-satunya *Super Power*. Bagi Amerika, tidak boleh ada yang menyaingi dirinya.⁸ Kerjasama AS-India merupakan salah satu cara mempertahankan hegemoni AS di dunia. Dalam pemikiran politik AS, secara umum diyakini bahwa tugas utama dari pemerintah federal adalah melindungi warga AS dari ancaman musuh-musuh asing.⁹ Bagi AS hukum internasional tidak dapat menghalangi tindakan AS karena hal ini menyangkut pertahanan diri atau *self defence*. Dalam beberapa kasus tertentu Amerika menganut paham seperti yang dikatakan Robert Kagan.

Kesepakatan nuklir sipil ini memunculkan reaksi dari negara anggota NPT. Anggota NPT yang terdiri dari negara anggota yang lunak pada proliferasi (abu-abu dengan status nuklir) disebut juga dengan negara "*the in-betweens*" dan negara anggota yang patuh dan mengikuti aturan (meskipun memiliki atau tidak senjata nuklir) disebut dengan negara "*the stalwarts*".¹⁰ Negara-negara ini pada umumnya menyetujui kesepakatan India-AS dengan tiga alasan:¹¹

⁸ Adian Husaini, "Menonton Dan Menunggu Janji Amerika Serikat," dalam <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0403/01/opini/882849.htm>, di akses 10 Juni 2008.

⁹ Lutfi Anggara, "Akar Neokonservatisme Dalam Ide-Ide Dasar Perpolitikan AS", *Jurnal Studi AS* Vol.XI No.2 (Juli-Desember 2006) hal 152.

¹⁰ Ashton B. Carter, "America's New Strategic Partner" *Foreign Affairs* July/Agustus 2006, Volume 85, no.4, dalam http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/060701_fa_india_pdp.pdf; Internet, diakses tanggal 18 April 2009. beberapa negara yang termasuk "*in-betweens*" ialah Afrika Selatan, Argentina, Brazil, Ukraina, Kazakhstan, Belarus, Korea Selatan, Taiwan, Libiya.

¹¹ *Ibid.*

1. mereka cenderung menyetujui argumen dari Whashington bahwa kepemilikan senjata nuklir India tidak dapat halangi/tanggguhkan. Dan India telah menguasai transefer teknologi.
2. India adalah sebuah negara demokrasi (bukan sebuah negara "yang nakal") yang dapat memainkan perannya dalam skala global ditahun mendatang.
3. selama 30 tahun, India berada dalam "penalti box" (larangan perdagangan nuklir) merupakan salah satu contoh keseriusan dari regim nonpoliferasi yakni bagi siapa saja yang melanggar norma/aturan yang ada akan dijatuhkan sangsi.

Meskipun India bukan anggota NPT namun peranan India bagi AS dinilai sangat penting. Beberapa tanggapan positif datang dari anggota senior dari partai Republik Joe Wilson yang mengatakan "*The United States and India need to continue to be fair and willing partners on economic, energy, and national security issues.*"¹²

Persaingan nuklir India, Pakistan dan Cina di Asia secara logika tidak akan menimbulkan perang nuklir, mereka hanyaujuk kekuatan untuk pengakuan diri dan juga sebagai pengamanan. Kekhawatiran AS lebih terletak pada sistem keamanan persenjataan nuklir, karena teroris dapat membeli ataupun mencuri pengembangan senjata nuklir. Untuk itu AS harus memproteksi dan mengawasi pengembangan nuklir dikawasan Asia Selatan (salah satu cara melalui kesepakatan nuklir sipil AS-India) untuk keamanannya. Pencarian alternatif energi bagi AS merupakan jalan keluar mengatasi ketergantungannya pada bahan bakar fosil. untuk itu AS menerapkan kebijakan luar negerinya yang mengutamakan sumber energi (*energy security*). Tidak hanya dibidang nuklir, AS mendekati India dengan melaksanakan kerjasama dibidang pertahanan. Pada bulan Februari 2008 menteri pertahanan AS Robert Gates berkunjung ke India dalam rangka mempererat hubungan militer dengan India.

3.1.2 Ekonomi

¹²India News Online, "There is Life beyond 123 agreement, US Lawmakers and expert agree", dalam <http://news.indiamart.com/news-analysis/there-is-life-beyond-19207.html>; Internet, Diakses Tanggal 24 Mei 2009.

Tidak dapat dielakkan bahwa negara yang memiliki kemampuan industrial dan terlibat secara luas dalam perdagangan internasional cenderung memiliki kekuatan militer. Penggunaan militer disini untuk pengamanan ekonomi itu sendiri.

Untuk itu perlu bagi negara-negara berkembang seperti India, Cina membangun kekuatan militernya untuk pengamanan perekonomiannya. Diwilayah Asia, Cina dan India merupakan kekuatan ekonomi baru yang besar. Pertumbuhan Ekonomi India mencapai 7% dan Cina mencapai 10% pada tahun 2008, dengan GDP (*Gross National Product*) masing \$3,27 trilyun dan \$7.8 trilyun.¹³ Angka tersebut juga menunjukkan bahwa AS perlu menyesuaikan kebijakan politik, ekonomi dan militernya di Asia pada umumnya. India akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang besar didunia.

Energi nuklir di AS menjadi sumber pilihan alternatif kedua setelah batubara/ energi fosil lainnya. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, penggunaan nuklir sebagai energi PLTN memberikan banyak keuntungan (menghasilkan energi yang besar sedang bahan baku yang diperlukan sedikit). Meskipun terdapat beberapa resiko dalam penggunaan energi nuklir, namun bagi AS manfaat menjadi hal yang lebih penting dari potensi permasalahan yang mungkin ditimbulkan. populasi penduduk dunia akan terus bertambah, otomatis kebutuhan energi akan semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi AS antara tahun 1973-1990 mencapai kenaikan hingga 50% dan dalam periode yang sama perkembangan penggunaan energi listrik mencapai 58%.¹⁴ Dari data ini dapat digambarkan bahwa untuk menguatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah (pertumbuhan populasi yang semakin besar) diperlukan sumber energi listrik yang berimbang. Pada tahun 1973 beberapa negara Timur Tengah (OPEC) mengembargo minyak ke AS (termasuk juga beberapa negara Eropa dan Jepang) dan hal ini mengakibatkan terjadinya guncangan ekonomi di AS (krisis minyak dunia).¹⁵ Pada saat embargo minyak

¹³ CIA, "The World Factbook", <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html>: Internet: 10 Mei 2009.

¹⁴ Ilan Kipper and Jon stone, "Nuclear Energy and Society", dalam <http://www.umich.edu/~gs265/society/nuclear.html>: Internet: diakses tanggal 3 Mei 2009.

¹⁵ Pada tahun 1973 harga pangan dan bahan baku mengalami kenaikan ditambah lagi dengan embargo minyak Negara penghasil minyak (OPEC) mengakibatkan perekonomian AS semakin memburuk.

tahun 1973, minyak AS dilaporkan sekitar 17%. Untuk persediaan listrik dari energi nuklir sekitar 5%. Dan ditahun 1990, meskipun persediaan minyak untuk listrik AS sekitar 4%, energi nuklir diperkirakan sekitar 20%. Dampaknya AS mengimpor kurang dari 20 juta barrel per tahun.¹⁶ Untuk contohnya, sejak 1973, energi nuklir diganti dengan impor minyak sekitar 4,3 milyar barrel sehingga menurunkan defisit belanja sekitar US\$12 milyar. Penyebab pengurangan dalam defisit perdagangan ini menunjukkan pertumbuhan GDP yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Begitu juga ditahun 1978 saat harga minyak dunia naik, perekonomian AS yang sudah goncang menjadi lebih parah. Dan yang terbaru tahun 2007-2008 krisis ekonomi AS semakin diperparah dengan naiknya harga minyak dunia hingga level tertinggi yaitu lebih dari US\$ 100 per barell pertengahan tahun 2008.

Tantangan energi bagi AS sudah dirasakan sejak perkembangan ekonomi AS yang semakin pesat, ketidak stabilan harga minyak dunia, cadangan minyak yang semakin menipis, kebutuhan dunia yang semakin meningkat terhadap energy. Ketergantungan AS pada bahan bakar minyak asing tidak hanya meruntuhkan/ menjatuhkan keamanan nasional namun juga membuat ketimpangan pada perekonomian dan permasalahan pada kesejahteraan masyarakat diseluruh AS. Presiden Obama dan Wakil Presiden Biden mengajukan rencana investasi energi alternatif dan energi yang dapat diperbaharui agar AS dapat mengurangi ketergantungan nya pada ekspor minyak, mengatasi krisis global di AS dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Rencana Obama-Biden untuk energi baru bagi AS ialah:¹⁸

- Help create five million new jobs by strategically investing \$150 billion over the next ten years to catalyze private efforts to build a clean energy future.
- Within 10 years save more oil than we currently import from the Middle East and Venezuela combined.

¹⁶ *Op. Cit* Illan Kipper and Jon stone

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Op. Cit.*, "Energy and The Envirotment"

- Put 1 million Plug-In Hybrid cars -- cars that can get up to 150 miles per gallon -- on the road by 2015, cars that we will work to make sure are built here in America.
- Ensure 10 percent of our electricity comes from renewable sources by 2012, and 25 percent by 2025.
- Implement an economy-wide cap-and-trade program to reduce greenhouse gas emissions 80 percent by 2050.

3.2 Perkembangan Nuklir di India

Kolonisasi dan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki berdampak besar bagi para pemimpin India. Mereka menganggap bahwa ketertinggalan teknologi dan militer yang lemah merupakan faktor utama dari kolonisasi.¹⁹ Teknologi nuklir merupakan faktor yang tepat untuk pembangunan dan juga untuk pertahanan. Dalam jangka beberapa tahun India telah memiliki reaktor nuklir, mempunyai fasilitas penambangan uranium, pembuatan bahan bakar, pabrik air keras (*heavy water*), pengolahan kembali sisa bahan bakar

Program nuklir india dapat dibagi menjadi 3 tahapan:

1. tahap pertama didasarkan pada sentiment Nehru, diawali pada pertengahan tahun 60an. selama masa ini merupakan program nuklir besar-besaran, tujuan utama untuk memproduksi energi yang telah direncanakan. (sementara infrastruktur yang ada tidak mendapat izin memproduksi senjata nuklir, kemungkinan penggunaan untuk tujuan pertahanan....)
2. tahap kedua, pada awal pertengahan 60an, demonstrasi kemampuan nuklir india melalui "*peaceful nuclear explosion*" di tahun 1974. pada masa ini rangka dasar untuk memproduksi senjata nuklir mulai dilaksanakan. namun militer tidak mau mengakui.
3. tahap yang ketiga India beranggapan bahwa mereka mempunyai alasan yang kuat untuk membangun persenjataan nuklir, namun alasan itu bukanlah sebuah pilihan untuk menghasilkan/memproduksi atau

¹⁹ Ibid.

menyebarkan persenjataan. India meningkatkan/ memperbanyak pembangunan gudang persenjataan nuklir sesuai dengan program yang telah ada.²⁰

Semenjak kemerdekaan India, dunia telah memasuki area nuklir (khususnya antara AS dan Uni Soviet). Beberapa negara besar (Inggris, Kanada, AS) menawarkan bantuan teknis pada India yang belum berpengalaman dalam bidang nuklir. Kerangka penawaran ini adalah pengelolaan nuklir sipil/secara damai. Pada masa kepemimpinan Eisenhower, AS memberikan bantuan berupa pinjaman lunak sebesar \$80 juta untuk membangun reaktor nuklir India yang pertama di Tarapur (dibangun oleh General Electric).²¹ Tujuan AS saat itu ialah mencegah ancaman Uni Soviet dalam penggunaan energi atom dalam militer. Di negara dunia ketiga. Alasan lain dari bantuan AS ke India saat itu adalah pengembangan bom nuklir di Cina. Dalam memorandum *Director Of The Policy Planning Council* George McGhee kepada Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk pada tahun 1961 adalah anjuran agar AS memberikan bantuan kepada India dengan maksud untuk mengurangi dampak politik bom Cina (namun Rusk menolak ide ini karena Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru sepertinya akan menolak ide tersebut).²²

India dimasa ini merupakan salah satu negara pencetus *non-aligned* (non-blok) yakni tidak bersekutu dengan salah satu blok. Saat itu India juga membuat beberapa permintaan pengajuan terutama bagi *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) atau Traktat Larangan Uji Coba Nuklir.²³ Dalam proposal pengajuan yang bertanggal 8 April 1954, Nehru menginginkan negosiasi dengan negara

²⁰M.V.Rahmana, "The Indian Nuclear Bom", <http://www.fas.org/nuke/guide/india/nuke/index.html>; Internet, diakses tanggal 5 Mei 2009.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ "Comprehensive Test Ban Treaty", dalam <http://www.acronym.org.uk/ctbt/index.htm>; Internet, Diakses tanggal 20 Mei 2009. Merupakan salah satu kelanjutan kesepakatan larangan uji coba nuklir yang di prakarsai oleh PBB. Sebelum CTBT ada Partial Test Ban Treaty (PTBT) pada tahun 1963 yakni merupakan larangan uji coba nuklir di dalam laut, permukaan tanah dan atmosfer. Sedangkan dalam CTBT ditambah dengan larangan uji coba nuklir di dalam tanah. CTBT ditandatangani tahun 1996. Sesuai dengan artikel XIV, kesepakatan ini harus diratifikasi 44 negara yang memiliki reaktor nuklir. Dari 44 negara ini, 3 negara belum menandatangani (India, Pakistan, dan Korea Utara) sedangkan Amerika Serikat sudah menandatangani namun belum meratifikasi kesepakatan tersebut. Dalam pidato 5 April 2009, Presiden Obama berjanji akan secepatnya meratifikasi kesepakatan ini.

pemilik senjata nuklir yang dikenal dengan “*Standstill Agreement*”. Ia meminta adanya saling menghargai dalam uji coba nuklir, meskipun perjanjian penghentian produksi dan penimbunan nuklir sedang dalam perundingan.²⁴ Pada saat Pengajuan ini Dunia Internasional terfokus pada bahayanya dampak radioaktif.

Pada bulan Agustus 1948 India membentuk komisi energi atom (*Atomic energy commission/ AEC*) untuk meneliti dan mengolah uranium dibawah *Departemen of Scientific Research*. Tanggal 3 Agustus 1954 pemerintah India mendirikan *Departement Of Atomic Energy* (DAE) dan berdasarkan ketetapan pemerintah tanggal 3 Agustus 1958, AEC dipindahkan dibawah naungan DAE. AEC kemudian membentuk sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama *Uranium corporation of India Limited* (UCIL).²⁵ UCIL didirikan pertama kali pada tanggal 4 Oktober 1967 dibawah pengawasan AEC. Aktifitas UCIL pertamakali dilaksanakan tahun 1968 dengan membuka pertambangan bijih dan fasilitas pemrosesan di Jaduguda, Bhatin, Narwapahar. Reaktor nuklir pertama India dibangun tahun 1955 bernama 1MW Aspara dengan bantuan Inggris. Pada tahun 1956 setelah satu tahun bernegosiasi India-Kanada, maka Kanada menyetujui menyuplai penuh penelitian reaktor *40 MW Canada-India Reactor* (CIR). Pada masa pemerintahan Eisenhower program “*atom for peace*” dilaksanakan, dimana AS menyetujui menyediakan 21 ton “air keras” untuk 40 megawatt reaktor (untuk meneliti). Reaktor ini lebih dikenal dengan *Cirus* yaitu kerjasama reaktor antara Kanada-India dan AS (sebelumnya CIR, situasi ini membuat India berkesempatan membuat *extrac plutonium* untuk membuat senjata nuklir). Sedangkan reaktor komersial pertama kali dioperasikan tahun 1969 di Tarapur. Ditahun 1958 DAE menggunakan 1/3 dari anggaran penelitian India untuk meneliti nuklir.

Semenjak tahun 1958, India sudah mempersiapkan diri untuk membangun persenjataan nuklir, dan atas bantuan AS pada tahun 1959 para ilmuwan India ajarkan menangani dan mengelola plutonium secara aman. Kondisi

²⁴ *Op.Cit* M.V.Rahmana.

²⁵“Atomic energy commission”, dalam <http://www.aec.gov.in/>;Internet, diakses tanggal 3 Mei 2009.

pasca PD-II mengakibatkan India memperlengkapi diri dengan senjata nuklir.²⁶ Selain alasan perebutan wilayah Khasmir, yang mengakibatkan perlombaan senjata antara India dan Pakistan, Cina merupakan alasan lainnya.²⁷ India yang berbatasan dengan Cina (negara yang mempunyai nuklir) merupakan ancaman lain karena secara geografis dibagian utara India berbatasan dengan Cina. Pada satu sisi Cina mendiami Aksai Chin (daerah strategis yang menghubungkan Xinjiang ke Tibet) yang berbatasan dengan Ladakh di Khasmir. Disisi lainnya daerah perbatasan India *North-East* yang didiami oleh para India di klaim oleh Cina.²⁸ Penetapan Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan penandatanganan NPT menjadikan India lebih mawas diri dalam menyusun strategi dan meningkatkan pengembangan persenjataan nuklir. Hubungan Bilateral AS-India setelah Perang Dingin

Pandangan Nehru sebagai Perdana Menteri saat itu mengenai nuklir sangat kuat dan pemikirannya ini sangat mempengaruhi pandangan India kedepannya.²⁹ Nehru beranggapan bahwa India membutuhkan nuklir untuk mempertahankan diri dan untuk kejayaan sebagai sebuah bangsa. Setelah percobaan nuklir China, didalam negeri India sendiri para birokrat, partai politik maupun ilmuwan sependapat bahwa India harus membangun bom nuklir. Berbagai kebijakan seringkali

²⁶ "India's nuclear Weapon Program: The Beginning: 1994-1960", dalam <http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html>; Internet: diakses tanggal 3 Mei 2009. Setelah berakhirnya PD-II, terbentuk nya PBB (26 Juni 1945) dimana Cina menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, demonstrasi besar-besaran untuk memusnahkan persenjataan nuklir (saat itu persenjataan nuklir yang sederhana masih diizinkan), pemisahan Inggris India dengan negara India dan Pakistan yang moderen.

²⁷ Perebutan wilayah Kasmir India-Pakistan mengakibatkan pecahnya perang di tahun 1971. Pakistan dibantu Cina sementara India dibantu oleh Uni Soviet dengan berbagai perlengkapan militer. Kerjasama ini membuat Cina saat itu mulai menjalin hubungan dengan AS (selama perang dingin). AS dan Cina memberikan bantuan khususnya ekonomi dan militer kepada Pakistan. Namun setelah berakhirnya perang dingin, bagi AS peranan Cina dalam menghalangi Uni Soviet sudah tidak diperlukan lagi. India pada saat ini sudah mulai menjalin kerjasama dengan AS.

²⁸ Konflik wilayah perbatasan antar keduanya mengakibatkan pecahnya perang Sino-India pada tanggal 20 Oktober 1962 namun kekuatan India jauh dibawah Cina. Menyadari kurangnya kekuatan maka India mulai menjalin hubungan kerjasama dengan Uni Soviet khususnya di bidang militer. Cina yang melihat hal ini akhirnya menjalin hubungan dengan Pakistan. Hubungan Cina – Uni Soviet pun tidak berjalan dengan baik salah satu faktornya adalah masalah perbatasan.

²⁹ "Jawaharlal Nehru Biography", http://www.indianchild.com/jawaharlal_nehru.htm; Internet, Diakses tanggal 20 Mei 2009. Berdasar pada keadaan India sebelum nya Nehru memberikan nilai-nilai/ prinsip yang diterapkan pada masa kepemimpinannya. Nilai tersebut adalah nasionalisme, antikolonialisme, tidak memihak pada salah satu blok/*nonaligment*, dan internasionalism.

dikaitkan dengan isu bom nuklir, sehingga muncul istilah "Bomb Lobby" di India. *Bomb loby* terdiri dari orang-orang birokrat, partai politik, maupun ilmuwan yang menginginkan india membangun bom nukir. Pandangan mereka seringkali sangat menonjol dalam suatu perdebatan. Para *bomb loby* berpendapat bahwa senjata nuklir dibutuhkan untuk mengcounter/mengimbangi senjata nuklir lainnya dan itu merupakan jaminan keselamatan. Mereka juga mengatakan senjata nuklir relatif lebih murah daripada senjata konvensional dan dapat meningkatkan imbalan kekuatan dengan negara lainnya. Salah satu kunci utama perkembangan senjata nuklir adalah pendiri program nuklir India, *Homi Bhabha*.³⁰ Bhabha kemudian mendirikan *Tata Institute of Fundamental Research*, awal mulanya program nuklir India tahun 1945.

Berdasar latar belakang itu India harus membangun persenjataan nuklirnya, meskipun pada awalnya banyak negara yang tidak begitu yakin dengan hal ini. Namun Raj Ramanna (pemimpin pelaksanaan program senjata nuklir India) sangat optimis dengan programnya. Ia mengatakan bahwa para ilmuwan India akan menunjukkan kemampuannya, dan jangan hanya menilai dari masa lalu dan jangan pernah menganggap remeh India :

There was never a discussion among us over whether we shouldn't make the bomb. How to do it was more important. For us it was a matter of prestige that would justify our ancient past. The question of deterrence came much later. Also, as India scientists we were keen to show our Western counterparts, who thought little of us those days, that we too could do it³¹

Program senjata nuklir pertama India *Bhabha Atomic Research Center (BARC)* diresmikan oleh Perdana Menteri Nehru di Trombay pada tanggal 20 Januari 1957. Pada bulan Juli 1958, Nehru meresmikan proyek *Phoenix* yaitu berupa bangunan dengan kapasitas 20 ton bahan bakar setahun (sesuai dengan kapasitas *Cirus*). Proyek nuklir sipil India juga dimulai sekitar tahun 1960an, bekerjasama dengan perusahaan dari AS (di Tarapur).³² Tahun 1974, India melakukan uji coba

³⁰ Homi Bhabha adalah seorang ahli Fisika. setelah percobaan nuklir Cina, Bhabha dalam pidatonya yang disiarkan di radio mengatakan bahwa India harus secepatnya membuat senjata nuklir.

³¹ *Op.Cit.*, Chengappa, dalam *India's nuclear Weapon Program*

³² *Ibid.* Tarapur merupakan

nuklirnya yang pertama yang disebut dengan “*Smiling Buddha*”. Namun karena tindakannya ini India dikenakan sanksi Internasional baik dalam ekonomi maupun larangan mensuply bahan bakar nuklir ke India. India menjadikan nuklir sebagai identitas pertahan India. Namun setelah tahun 2005, AS menjalin kerjasama dengan India, khususnya nuklir sipil. Berdasarkan data *world nuclear power*, kekuatan nuklir India sebagai berikut:³³

- India mempunyai 17 reaktor nuklir yang beroperasi dan enam reaktor sedang dibangun.
- India memiliki tenaga nuklir buatan dalam negeri yang berkembang pesat dan diperkirakan akan menyediakan 20 ribu Mega Watt (MW) listrik berkapasitas nuklir pada 2020. Listrik ini siap dibuka untuk pasar internasional.
- Saat ini tenaga nuklir memenuhi 3% kebutuhan listrik India dan diharapkan akan memenuhi 25% kebutuhan listrik pada 2050.
- Cadangan batu bara dan uranium terbatas, namun India memiliki cadangan thorium sebesar 290 ribu ton- sekitar 25% dari total cadangan dunia- yang diperkirakan akan menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir dalam jangka panjang.
- Senjata nuklir India berkembang terpisah dari proses nuklir sipilnya dan memakai Uranium dalam negeri.

Pada awalnya kesepakatan kedua negara banyak berhadapan dengan bentrokan kepentingan. AS tidak mengizinkan India mengolah kembali bahan bakar nuklir karena proses tersebut dapat berubah fungsi menjadi pembuatan senjata nuklir. Untuk itu India mengirim utusan satu delegasi tingkat tinggi (Penasehat Keamanan Nasional MK Narayanan, Menteri Luar Negeri Shivshankar Menon dan Kepala Energi Atom India Anil Kakodar) ke AS.

³³ ”Komunis India Tolak Perjanjian Nuklir Koran Tempo, 3 Juli 2008”, dalam <http://www.korantempo.com/korantempo/email/2008/07/03/Internasional/krn.20080703.135659.id.html>, Internet, diakses tanggal 6 Juli 2009.

BAB 4

ARTI STRATEGIS 123 AGREEMENT BAGI AMERIKA SERIKAT

Politik luar negeri suatu bangsa merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri dengan berlandaskan kepentingan nasional. Politik global Amerika Serikat (AS) juga ditujukan untuk menjaga keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, AS sangat berkepentingan untuk ikut serta dalam usaha-usaha menjaga dan mengembangkan “perdamaian dunia” (demi kepentingannya). Stabilitas politik internasional tentu saja sangat berpengaruh bagi keamanan AS. Pergeseran dinamika kepentingan AS di Asia Selatan khususnya India salah satunya dapat dilihat dari program kerjasama nuklir sipil AS-India. Bagi AS, posisi India sangat menunjang kepentingan ekonomi, politik dan keamanan. Para pendukung kesepakatan India ini menyebutkan kerjasama ini seperti kebijakan Nixon dalam *open door policy*, namun yang membedakan adalah India sebagai negara demokrasi.¹

Seperti dalam pernyataan Kesepakatan nuklir sipil AS-India disebut dengan *Agreement For Cooperation Between The Government of The United State of America and The Government of India Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy*, namun lebih dikenal dengan *123 Agreement*. Kesepakatan ini disebut dengan *123 Agreement* karena didasarkan pada *US Atomic Energi Act (AEA)* tahun 1954, yang memuat peraturan kerjasama nuklir sipil AS dengan negara lain dalam pasal 123.² Pasal Undang-Undang ini kemudian menjadi acuan dalam *Hyde Act 2006*. *Hyde Act* merupakan undang-undang yang dibuat AS untuk melegalkan

¹ Ashton B. Carter, “Assessing the India Deal” disampaikan pada Testimony Before The Committee On Foreign Relation United States Senate, Rabu, 26 April, 2006, dalam http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/3992/assessing_the_india_deal.html?breadcrumb=%2Fexperts%2F863%2Fkenia_dormandy%3Fback_uri%3D%252Fpublication%252F18254%252Fus_worry_grows_over_pakistans_tribal_peace_deal%253Fbreadcrumb%253D%25252Fpublication%25252F19016%25252Flong_goodbye%26back_text%3DBack%2520to%2520publication%26page%3D4; Internet, Diakses Tanggal 3 februari 2009.

² Kerjasama *123 Agreement* tidak hanya dilakukan dengan India ada beberapa negara lain yang menandatangani kesepakatan nuklir sipil dengan AS yaitu Moroko, Ukraina, Romania, Switzerland, Arab Saudi dan Mesir. Jepang, Eurotom dan Cina masih dalam proses negosiasi, sedangkan dengan Russia masih tahap membuka wacana/pembicaraan. Dan dari beberapa negara yang di sebutkan hanya India yang tidak termasuk anggota NPT.

hubungan kerjasama nuklir sipil antara AS-India. Berikut beberapa kutipan *Hyde Act 2006* yang menyatakan bahwa *Hyde Act* mengarah pada *US Atomic Energy Act*:

TERMINATION OF NUCLEAR TRANSFERS TO INDIA.

(A) IN GENERAL. Notwithstanding the entry into force of an agreement for cooperation with India arranged pursuant to section 123 of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2153) and pursuant to this title, and except as provided under subparagraph (B), exports of nuclear and nuclear-related material, equipment, or technology to India shall be terminated if there is any materially significant transfer by an Indian person off...

Berdasarkan undang-undang AEA 1954 ada 9 pasal yang harus dimasukkan dalam *123 Agreement*, yang harus disepakati India yaitu:

Sec 123 (1) ; a guaranty by the cooperating party that safeguards as set forth in the agreement for cooperation will be maintained with respect to all nuclear materials and equipment transferred pursuant thereto, and with respect to all special nuclear material used in or produced through the use of such nuclear materials and equipment, so long as the material or equipment remains under the jurisdiction or control of the cooperating party, irrespective of the duration of other provisions in the agreement or whether the agreement is terminated or suspended for any reason;

Dalam pasal 123 (1) AS menginginkan adanya jaminan pengawasan/ pengamanan terhadap semua bahan nuklir, peralatan atau bahan-bahan yang masuk ke India. Tujuannya mengantisipasi jumlah material yang masuk ke India hanya terbatas untuk penggunaan nuklir sipil dan tidak dipergunakan untuk keperluan militer.

Sec 123 (2), in case of non-nuclear-weapon states a requirement, as a condition of continued United States nuclear supply under the agreement for cooperation, IAEA safeguards be maintained with respect to all nuclear materials in all peaceful nuclear activities within the territory of such state, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

Dalam pasal 123 (2) dimaksudkan agar *Non nuclear weapon state*, yang bekerjasama dengan AS harus menerima pengawasan dari IAEA, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol pengolahan nuklir.

Sec 123 (3); ... a guarantee by the cooperating party that non nuclear materials and equipment or sensitive nuclear technology to be transferred pursuant to such agreement, and no special nuclear material produced through the use of any nuclear materials and equipment or sensitive nuclear technology transferred pursuant to such agreement, will be used for any nuclear explosive device, or for research on or development of any nuclear explosive device, or for any other military purpose.

Dalam pasal 123 (3); ini dimaksudkan agar pihak yang bekerjasama dapat memberikan jaminan bahan transfer bahan *non-nuclear* dan teknologi nuklir akan diberikan sesuai dengan kesepakatan, dan kesemuanya itu tidak dipergunakan untuk keperluan militer. Hal ini perlu diperjelas agar tidak terjadi penyimpangan.

Sec 123 (4) ; ... a stipulation that the United States shall have the right to require the return of any nuclear materials and equipment transferred pursuant thereto and any special nuclear material produced through the use thereof if the cooperating party detonates a nuclear explosive device or terminates or abrogates an agreement providing for IAEA safeguards

Dalam pasal 123 (4) ditunjukkan bahwa AS berhak membatalkan dan meminta pengembalian semua material dan teknologi nuklir jika terjadi pelanggaran kesepakatan.

Sec 123 (5) ; a guaranty by the cooperating party that any material or any Restricted Data, any production or utilization facility, any special nuclear material produced through the use of any such facility or through the use of any material transferred pursuant to the agreement for cooperation will not be transferred to unauthorized persons or beyond the jurisdiction or control of the cooperating party without the consent of the United States.

Dalam pasal 123 (5) ini dimuat kesepakatan ada jaminan dari pihak yang bekerjasama bahwa berbagai bahan, data, produksi, fasilitas nuklir, tidak dapat ditranser keluar tanpa persetujuan dari AS.

Sec 123 (6); a guarantee by the cooperating party that adequate physical security will be maintained with respect to any nuclear material, any special nuclear material used or produced, production facility or utilization facility transferred pursuant to such agreement.

Dalam pasal 123 (6) Jaminan oleh pihak yang bekerjasama adanya jaminan keamanan yang berhubungan dengan bahan nuklir, baik itu yang dihasilkan maupun dari fasilitas produksi dataupun fasilitas transfer.

Sec 123 (7); a guaranty by the cooperating party that no material transferred pursuant to the agreement for cooperation and no material used in or produced through the use of any material, production facility, or utilization facility transferred pursuant to the agreement for cooperation will be reprocessed, enriched or (in the case of plutonium, uranium 233, or uranium enriched to greater than twenty percent in the isotope 235, or other nuclear materials which have been irradiated) otherwise altered in form or content without the prior approval of the United States;

Dalam pasal 123 (7) ini mengatur adanya jaminan oleh pihak yang bekerjasama agar semua bahan yang digunakan, fasilitas produksi, atau transfer teknologi (khususnya plutonium, Uranium 233, Uranium 235) tidak dapat diubah dalam bentuk lain tanpa adanya persetujuan dari AS.

Sec 123 (8) ; a guaranty by the cooperating party that no plutonium, no uranium 233, and no uranium enriched to greater than twenty percent in the isotope 235, transferred pursuant to the agreement for cooperation, or recovered from any source or special nuclear material so transferred or from any source or special nuclear material used in any production facility or utilization facility transferred pursuant to the agreement for cooperation, will be stored in any facility that has not been approved in advance by the United States.

Dalam pasal 123(8) ditunjukkan agar adanya jaminan dari pihak yang bekerjasama bahwa tidak ada Plutonium, Uranium 233, Uranium 235, yang ditransfer dalam fasilitas produksi / bahan produksi nuklir tanpa adanya persetujuan dari AS (mencegah terjadinya pengolahan untuk senjata nuklir)

Sec 123 (9); a guaranty by the cooperating party that any special nuclear material, production facility, or utilization facility produced or constructed under the jurisdiction of the cooperating party by or through the use of any sensitive nuclear technology transferred pursuant to such agreement for cooperation will be subject to all the requirements specified in this subsection.

Dalam pasal 123 (9) ini dimaksudkan adanya jaminan oleh pihak yang bekerjasama bahwasannya semua material nuklir, fasilitas produksi, pemanfaatan fasilitas produksi, dibangun berdasarkan yuridiksi dari kedua pihak yang bekerjasama. Dan kedua pihak yang bekerjasama harus mentaati segala ketentuan yang telah berlaku.

Kesepakatan diatas merupakan aksi tindak lanjut dari eksekutif (presiden, menteri luar negeri, menteri energi /*secretary of energy* dalam perundingan nya dengan *Nuclear Regulation Commision*) agar mendapatkan persetujuan dari kongres (kerjasama nuklir sipil India-AS ini dibuatlah *Henry J. Hyde Act United States-India peaceful Atomic Energy Cooperation Act of 2006*). Di Parlemen AS keputusan ini disetujui dengan perbandingan suara 359 : 68 dengan dukungan yang sangat tinggi terhadap program Bush. Walaupun India tidak menandatangani NPT namun India harus meninggalkan program senjata nuklir dan harus bekerjasama dengan AS maupun negara lainnya untuk mencegah penyebaran senjata nuklir.

Pada tanggal 18 July 2005, Presiden Bush dan Perdana Menteri Sighn mengumumkan AS –India akan bekerjasama dibidang nuklir sipil melalui *Nuclear Agreement*. Bagi AS ini adalah kesempatan bisnis dengan menjual teknologi nuklir sipil kepada India. Dua hari setelah kunjungan Bush yang pertama ke India tanggal 1 Maret 2006, AS dan India mengadakan "*join statement*" mengenai perkembangan hubungan strategis kedua negara khususnya dalam kerjasama

nuklir sipil. Untuk mendapat dukungan dari dalam negeri HoR AS mengajukan “Hyde Act 2006” atau “Henry J Hyde United State – India Peaceful Atomic Energy Corporation Act” pada tanggal 26 Juli 2006, yaitu persetujuan kongres yang menyatakan bahwa Washington akan bekerjasama dengan New Delhi dalam isu nuklir dan dibebaskan dari NPT.³ Dan pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden AS menerima kesepakatan dari kongres untuk *India Atomic Energy*.

Partai kiri (partai komunis) di India menolak kerjasama ini karena mereka menganggap kesepakatan ini adalah bentuk campurtangan pemerintah AS di India. Salah satu contoh penyebab penolakan kesepakatan ini ialah India harus mendukung upaya AS untuk menghentikan program nuklir damai di Iran. Sebelum nya India mendukung mendukung program nuklir damai di Iran dengan pengawasan dari IAEA. Seperti dalam pemberitaan situs *rediff news* 3 September 2005. Natwar Singh (*External Affair Minister*) mengatakan “we support the pursuit by Iran of its peaceful nuclear energy programme in keeping with Iran’s International obligations”.⁴ Namun setelah deklarasi kesepakatan kerjasama nuklir sipil AS-India, India harus mendukung penuh usaha-usaha AS untuk menghentikan program nuklir damai Iran untuk tetap melanjutkan kerjasama nuklir sipil ini. Partai komunis India menentang persyaratan kesepakatan ini karena dianggap India akan menjadi “budak” AS.⁵ Selain itu partai mempersoalkan beberapa isi dari *Hyde Act*. Seperti dalam *section 102: sense of congress* menyatakan bahwa AS tidak wajib memfasilitasi atau melanjutkan eksport nuklir ke India, jika India melanggar ketentuan (melakukan uji coba senjata nuklir) berdasarkan hukum AS :

³ B.B. Singh, “The Hyde Act 2006: India Nuclear Dillema”, *Atom For Peace: An International Journal*, Vol.1, No.4, 2007, dalam <http://www.inderscience.com/storage/212671013485119.pdf>, Internet, diakses tanggal 20 Mei 2009. Rancangan undang-undang ini disponsori oleh ketua komite Henry Hyde dari Partai Republik. Dalam join statement ini AS telah mengamandemen Atomic Energy Act 1954 (AEA 1954), dan dijadikan “Henry J Hyde United State – India Peaceful Atomic Energy Corporation Act” 2006. AEA 1954 adalah Undang-Undang Federal AS yang didasarkan pada Nuclear Regulatory Commission yaitu hukum fundamental AS yang mengatur penggunaan nuklir untuk sipil dan militer.

⁴ Sujit Chatterjee, “India Commits support to Iran’s Peaceful Nuke Programme”, dalam <http://www.rediff.com/news/2005/sep/03nukel.htm>, ; Internet, Diakses tanggal 24 Mei 2009.

⁵ Selama ini Negara anggota Non-Blok selalu mendukung program nuklir damai Iran.

(13) the United State should not seek to facilitate or encourage the continuation of nuclear export to India by any other party if such export are terminated under the US law

Section 103 (a)

(5) Given the special sensitivity of equipment and technologies related to the enrichment of uranium, the reprocessing of spent nuclear fuel, and the production of heavy water, work with members of the NSG, individually and collectively, to further restrict the transfers of such equipment and technologies, including to India.

(6) Seek to prevent the transfer to a country of nuclear equipment, materials, or technology from other participating governments in the NSG or from any other source if nuclear transfers to that country are suspended or terminated pursuant to this title, the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2011 et seq.), or any other United States law.

Adanya batasan transfer teknologi dan peralatan, maupun bahan-bahan nuklir ke India oleh undang-undang ini merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi India. Percobaan nuklir tahun 1998 oleh India yang mengakibatkan embargo oleh dunia internasional mengakibatkan terputusnya suplai bahan bakar nuklir India. Untuk itu India menginginkan adanya jaminan bahan bakar nuklir untuk reaktornya, dan konsekuensinya India mengizinkan IAEA mengawasi reaktor-reaktor sipil miliknya. India juga menuntut agar dapat memproses ulang sendiri bahan bakar nuklirnya yang telah digunakan. AS menganggap bahwa proses ulang bahan bakar nuklir ini hanya berlaku untuk negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi yaitu negara-negara maju seperti AS, Perancis atau Rusia, sedangkan India belum cukup mampu. Kekhawatiran Pemerintah AS adalah bahwa India akan menyalahgunakan hasil proses ulang bahan bakar nuklir untuk keperluan militer (proses penggunaan reaksi nuklir sipil/menghasilkan energi listrik dan pengembangan senjata nuklir secara ilmiah sama).

Pada tanggal 3 Agustus 2007, teks kesepakatan kerjasama AS-India dalam *123 Agreement* diumumkan oleh kedua negara, sepuluh hari kemudian Perdana Menteri India Signh memberikan statement di parlemen yang dikenal dengan *suo*

moto. Dalam pernyataan ini Sighn mengatakan bahwasannya "... kerjasama ini adalah hak India dan ditujukan untuk kepentingan India...".⁶ Namun Partai Komunis India memutuskan bahwa pemerintah India harus memilih antara kesepakatan dengan stabilitas pemerintahan. Partai ini juga memberikan peringatan "*serius consequence*" dan tidak mau bernegosiasi.

Salah satu syarat yang diajukan AS pada India ialah mengizinkan IAEA mengawasi nuklir sipil India, sehingga pada tanggal 9 July 2008 mengajukan persetujuan draf mengenai pengawasan IAEA, dan pada tanggal 1 Agustus 2008 IAEA menyetujui draf tersebut. Hal ini berarti pengembangan nuklir India dapat dimonitoring lebih jelas. Pada awal September 2008 President Bush mengirimkan tesk *123 Agreement* pada kongres untuk persetujuan akhir. Dan pada tanggal 27 September 2008, HoR menyetujui draf kesepakatan nuklir sipil India-AS dengan perbandingan suara 298:117. Tanggal 1 Oktober 2008, Senate juga menyetujui kesepakatan ini dengan perbandingan suara 86:13. Hal ini menunjukkan *123 agreement* dapat segera di sepakati oleh kedua negara. White House juga meminta Presiden Bush untuk menandatangani kesepakatan ini agar dimasukkan kedalam peraturan hukum, sehingga pada 8 Oktober 2008, Bush menandatangani *landmark* dari *123 Agreement*. Kesepakatan penandatanganan antara India dan AS dilaksanakan pada 10 Oktober 2008 oleh Condoleezza Rice dari AS dan Pranab Mukherjee di Washington DC.

4.1 Pragmatisme AS terhadap India

Persyaratan ini diberikan oleh AS agar meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi. Undang-Undang yang didasarkan oleh AEA 1954, merupakan landasan awal kesepakatan *123 agreement*. Beberapa ketentuan diubah dalam *Hyde Act 2006*, untuk melegalkan kerjasama ini. Hal ini sangat bertentangan dengan kesepakatan NPT yang melarang kerjasama dengan bukan anggota NPT. Pendekatan terhadap isi perjanjian ini ialah India harus mentaati segala peraturan

⁶ "Suo-Moto Statement By the Minister Of External Affairs, Shri Pranab Mukherjee on 'Indo-US Civil Nuclear Co-Operation' in Lok Sabha On December 12, 2006" dalam http://www.carnegieendowment.org/newsletters/SAP/pdf/jan06/suo_moto_statement_indo_us_civil_nuclear.pdf; Internet, Diakses Tanggal 24 Mei 2009.

yang telah disepakati dan jika India melaksanakan Uji coba senjata nuklir maka perjanjian ini dibatalkan dan semua peralatan dan material yang telah diberikan harus dikembalikan. Dengan hal ini AS dapat mengontrol laju perkembangan senjata nuklir India. Kerjasama India dengan negara lainnya (seperti Russia yang sebelumnya mempunyai hubungan baik dengan India) harus dibatasi. Rusia tidak dapat berkerjasama seperti sebelumnya karena terikat perjanjian kerjasama. Otomatis material nuklir Rusia tidak dapat masuk bebas ke India. Letak strategis India yang berbatasan dengan Cina, dan Pakistan juga berdekatan dengan Afganistan merupakan faktor lainnya (terorisme nuklir). Pakistan yang langsung berbatasan dengan Afganistan dinilai mempunyai posisi strategis untuk para teroris karena Pakistan memiliki kemampuan untuk membuat senjata nuklir dan mayoritas penduduknya adalah muslim. Berdasarkan logika teroris tidak dapat membuat bom nuklir kecuali mereka mendapatkan materi nuklir, maupun teknologi dari negara yang pernah memiliki persenjataan nuklir, dan hal itu dimiliki oleh Pakistan.

Posisi tawar AS terhadap India juga lebih tinggi. Contohnya seperti penekanan AS pada India yang harus mendukung AS melarang pengembangan nuklir sipil di Iran. Tujuan ini didasarkan agar Iran tidak melanjutkan pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Jika Iran berhasil mengembangkan nuklir nya, dampaknya akan sangat luas dan kepentingan AS dapat terancam. Iran mempunyai kekuatan baru (dapat meningkatkan perekonomian, stabilitas keamanan, tidak akan tergantung pada bahan bakar fosil yang semakin menipis). Dan hal ini adalah Ancaman bagi AS karena Iran tidak pernah patuh kepada AS (kemandirian Iran adalah ancaman AS).⁷ Upaya penekanan yang dilakukan AS melalui India adalah salah satu cara meredam kekuatan Iran.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati India tidak dapat mendatangkan material nuklir, maupun teknologi nuklir dari negara lain tanpa

⁷ Ajakan AS pada India untuk menolak program nuklir sipil merupakan salah satu cara untuk mengalangi koalisi agar Persoalan Iran dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Ancaman tersebut membuat Iran menandatangani NPT. Namun bukan hal yang tidak mungkin Iran terus melakukan pengembangan senjata nuklir. Saat ini AS tidak akan menyerang Iran seperti Iraq karena kondisi perekonomian AS masih buruk selain itu ancaman juga datang baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti halnya Israel pengakuan terhadap dirinya lebih didasarkan pada kekuatan yang dimilikinya (militer ataupun dukungan AS). Bukan karena wilayah, masyarakat, dan sebagainya.

persetujuan dari AS. Hal ini merupakan antisipasi sekaligus pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan pembatasan ini secara otomatis AS mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan negara lain untuk menjual teknologi dan bahan nuklir kepada India. AS melalui Menteri dagangan Carlos Gutierrez pada tanggal 16 Oktober 2008 mengumumkan pemberian jaminan kepada Dewan Bisnis AS-India (*US-India Business Council*) untuk mengadakan perdagangan nuklir Sipil ke India. Proyek ini bernilai US\$150 miliar dan akan berlangsung selama 30 tahun mendatang. Lebih lanjut Guitierrez juga menjanjikan bahwa kerjasama ini akan memberikan keuntungan bagi kedua negara dan AS akan menjadi mitra India.⁸ Berikut kutipan pernyataan Guitierrez:

...we encourage the government of India to continue working cooperatively to target environmental goods for trade liberalisation. ...more than ever, trade is critical. In fact trade continues to be the bright spot of the US economy. Last year, US exports totalled a record \$1.6 trillion. As of August, US exports have increased by 18 percent year-to-date, over 2007,...these are challenging economic times. And like other countries throughout the world, India and the next US administration will have to set policy for the future... 'AS President Bush said, the US and India are natural partners as we head into the 21st century'. This "Green India" summit is another opportunity to explore and develop ways to grow our economies while contributing to cleaner, safer healthier environments.

Dari kutipan tersebut dapat digambarkan bahwa AS akan menjadikan India sebagai mitra masa depan. Perusahaan AS dapat menjual bahan dan teknologi yang jumlah investasi yang sangat besar. Dengan kata lain perdagangan ini juga merupakan keuntungan bagi perkembangan pendapatan dalam negeri AS. Pada langkah berikutnya sebagai perluasan dari *123 Agreement* India akan memberikan prioritas /perlakuan khusus untuk industri-industri AS di India. India sendiri akan dijadikan negara mandiri dibidang energi yang bersih. Kerjasama ini diharapkan

⁸ Thaindian News. "Eyeing India's \$150 bn Nuclear Pie, US Sending Trade Team in December: Oktober 16th 2008". dalam http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/eyeing-indias-150-bn-nuclear-pie-us-sending-trade-team-in-december_100107749.htm : Internet. Diakses tanggal 15 Juli 2009.

dapat mempermudah dan membuka kerjasama dibidang lainnya. Kedepannya AS mengharapkan adanya kelanjutan hubungan yang lebih baik dengan India khususnya dibidang militer. Sehingga jika AS membutuhkan patner/mitra untuk menangani bencana, intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*), dan misi perdamaian, AS dapat mengandalkan India sebagai patnernya. India juga dapat dijadikan wilayah pangkalan/ tempat transit bagi AS jika dibutuhkan khususnya di Samudra Hindia.

4.2 India dan 123 Agreement

Penting bagi India untuk mempertahankan dan mendapatkan dukungan dari negara besar seperti AS dalam pelaksanaan kegiatan nuklir India. Ancaman yang berasal dari negara tetangga seperti Pakistan, terutama Cina menjadikan India lebih mawas. Menteri Pertahanan India, Fernandes mengatakan bahwa "Cina adalah ancaman potensial India yang utama", "Cina telah mengambil kepulauan kelapa Myanmar untuk mendirikan sebuah stasiun pengawasan yang akan mengawasi India, dan Beijing merupakan induk dari misil-misil Ghauri Pakistan".⁹ Dalam surat Vajpayee kepada Clinton yang diterbitkan *New York Time*, ia menuliskan "...kondisi lingkungan keamanan yang memburuk, terutama pada lingkungan nuklir, dihadapi oleh India beberapa tahun belakangan ini...", "...persenjataan nuklir jelas dinyatakan pada lingkup negara kami, sebuah negara yang pernah mengadakan agresi bersenjata terhadap India pada tahun 1962...".¹⁰ Maksud dari Vajpayee adalah Cina.

AS memandang kesepakatan ini sangat baik bagi India karena India mendapatkan pengakuan secara defacto penggunaan teknologi nuklir sipil. India dapat mengimpor uranium yang selama ini menjadi hambatan dalam program nuklir India. Kesepakatan ini terlihat seperti menjadi *nuclear club*, tanpa harus mendatangi NPT. India maupun AS tidak harus membayar biaya untuk pengakuan dari NPT. Namun meskipun hal ini adalah pengecualian AS tetap berprinsip aturan-aturan pokok dalam NPT tetap dilaksanakan. Bagi India

⁹ O.Solihin, "Analisis Politik", dalam <http://osolihin.wordpress.com/2007/10/31/analisis-politik/>; Internet, Diakses Tanggal 28 Juni 2009.

¹⁰Ibid

kesepakatan ini merupakan batu loncatan untuk dapat disejajarkan dengan negara besar seperti Cina. Secara ekonomis, penggunaan energi nuklir nantinya akan menghemat biaya produksi. India tidak harus membeli bahan bakar fosil yang mahal untuk keperluan perindustriannya.

Para komunitas pebisnis India juga sangat mendukung kesepakatan ini karena peluangnya sangat menguntungkan bagi mereka (semakin kuatnya kekuatan mayoritas dapat mendukung *security energy*). Namun perlawanan didapatkan dari aliansi partai komunis India (*Left Front*) yang menganggap program nuklir ini memiliki dampak negatif bagi India, kesepakatan ini juga "cacat" dan pada akhirnya akan membawa India pada suatu langkah krusial dimana AS akan mengunci India dalam bentuk strategi global AS. Namun Menteri Luar Negeri Mukherjee mengatakan tidak akan menyerah dalam bernegosiasi dan melanjutkan upaya penyelesaian permasalahan dengan *Left Front*. Penolakan partai komunis menghambat proses kesepakatan *123 Agreement*, karena terdapat empat fraksi komunis yang menjadi pendukung penting pemerintahan koalisi pimpinan Singh (pemerintahan *United Progressive Alliance/UPA*).¹¹ Para pimpinan *Left Front* juga mengancam akan menarik dukungan dari Aliansi progresif bersatu atau UPA.

Pada tanggal 8 Juli 2008, partai komunis secara resmi menarik dukungan terhadap pemerintahan koalisi, dan menentang dengan mengatakan "menolak bekerjasama dengan negara yang agresif di dunia saat ini". Namun masih ada dukungan lain dari *Domestic Political Reaglinment* (golongan bawah), dengan dukungan yang tersisa ini Perdana Menteri Singh merasa optimis dengan prospek kesepakatan nuklir sipil AS-India. New Delhi kemudian menyepakati persetujuan IAEA, dengan memberikan draf persetujuan *safeguards*. Pertengahan bulan Juli Menteri Luar Negeri (foreign secretary) India Menon bersama dengan *Under*

¹¹ "Komunis India Tolak Perjanjian Nuklir", *Koran Tempo*, 3 Juli 2008. India menganut sistem multi partai sebagian partai besar yaitu; Partai Kongres, Partai Bharatiya Janata, dan Partai Komunis (*the Left Front*). Tahun 2004 Partai kongres yang dipimpin Singh sebenarnya menguasai 145 dari total 543 kursi di parlemen, sedangkan Partai Bharatiya Janata (BJP) memiliki 138 kursi. Kedua partai ini kemudian berkoalisi dengan partai-partai kecil, sehingga total (lanjutan) (lanjutan) perolehan kursi Partai Kongres menguasai 218 kursi dan BJP menguasai 185 kursi. Perbedaan yang tipis ini mengakibatkan ketergantungan kongres pada partai-partai kecil sangat tinggi.

Secretary of State William Burns mengadakan perundingan dengan Ketua IAEA Mohammed El Baradei di Vienna. India kemudian gencar mencari dukungan dari negara-negara suppliers nuklir (Nuclear Suppliers Group/ NSG) dan terus melobi IAEA.¹² 1 Agustus 2008, IAEA menyetujui *safeguard* dengan India. Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan India ialah meyakinkan dan memperoleh pedoman dari NSG agar dapat menyetujui transaksi bahan dan teknologi nuklir dalam pasar internasional. Beberapa negara NSG, seperti Jepang ragu menyetujui perdagangan bahan dan teknologi nuklir dengan India karena status India yang bukan anggota NPT dan pernah melakukan uji coba nuklir. Situasi AS dan India saat itu menjelang pemilihan umum (pemilihan presiden), sehingga kesepakatan harus segera dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, makna penting dalam menjalin kerjasama dengan India maka kerjasama kedua negara terus berkembang dalam bidang teknologi, ekonomi dan militer.

4.3 AS, India dan Cina dalam 123 Agreement

Keterkaitan hubungan AS-India dalam *123 Agreement* adalah menjadikan India sebagai penyeimbang kekuatan Cina di Asia, hal ini didasarkan pada adanya kompetisi strategis antara AS dengan Cina. AS mempersiapkan India (dan juga Pakistan) untuk menjadi pertahanan depan dalam menghadapi Cina. Jumlah penduduk India yang berlimpah merupakan aset bagi AS. Clinton mengatakan “beberapa diantara bangsa AS yakin bahwa kita harus berusaha untuk mengisolasi dan mengisi Cina dikarenakan penggunaan sistem yang tidak demokratis dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Hal menjadikan potensi konflik bagi AS dimasa depan.” Bagaimanapun “memulai konflik dengan Cina adalah hal yang vital. Meskipun pada waktu yang bersamaan AS menghindari konfrontasi dengan Cina dan menyangkal akan adanya perselisihan dimasa datang dengan Cina didepan publik. Hal ini disebabkan karena modal dari AS yang masuk ke China

¹² *45Nuclear Supplier Group* adalah: Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgia, Brazil, Bulgaria, Kanada, Cina, Kroasia, Cyprus, Republik Chechnya, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerma, Yunani, Hongaria, Irlandia, Itali, Jepang, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Switzerland, Turki, Ukraina, Inggris, dan AS.

telah mencapai jutaan dollar dan AS berharap dapat mengontrol dan mempengaruhi Cina dalam jangka waktu yang lama.¹³

Hubungan bilateral antara Cina dengan AS tidak begitu stabil.¹⁴ Perdebatan mengenai hubungan Cina dan AS sudah lama dibicarakan. China adalah negara komunis terbesar setelah kejatuhan Uni Soviet. Meskipun menganut sistem komunis namun dalam perkembangan bidang ekonominya, Cina mereformasi menganut sistem ekonomi pasar dan menjadikan kekuatan baru pada masa Deng Xiaoping.¹⁵ Menurut Van Ness (1997) dalam teori hubungan internasional, situasi politik yang paling berbahaya adalah bila sebuah kekuatan muncul pada suatu wilayah yang telah didominasi oleh sebuah negara yang memiliki kekuasaan hegemoni, hal ini menimbulkan konflik. Usaha AS untuk menghambat kekuasaan Cina dimulai sekitar tahun 1960an. Lebih lanjut Van Ness (1997) menggambarkan bahwa para pakar AS-Cina dari AS saat itu berpendapat perlunya memodifikasi kebijakan Perang Dingin terhadap komunisme Cina, yakni menjadi *contaiment* dan *engagement*. Perubahan kebijakan ini dari *contaiment* dan *isolation* menjadi *contaiment without isolation*. Namun, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah hubungan AS-Cina selalu bermasalah dan hanya bisa diselesaikan melalui campurtangan dari pihak lain. Sekitar tahun 1960an sampai dengan awal tahun 1970an hubungan kedua negara mengalami perbaikan, karena saat itu hubungan Cina-Uni Soviet sedang buruk (terlebih lagi saat itu Presiden AS Nixon mengunjungi Cina).¹⁶ Upaya AS untuk menekan perkembangan Cina juga melalui Taiwan. Perbedaan karakteristik

¹³ Ibid.

¹⁴ Kasus Tiananmen tahun 1989 membuat AS membekukan hubungan diplomatiknya dengan Cina (demonstrasi ribuan mahasiswa di lapangan Tiananmen namun pemerintah Komunis Cina menanggapi dengan aksi militer sehingga terjadi pelanggaran HAM). Pada tahun 1999 hubungan AS-Cina kembali goncang karena AS (NATO) salah membidik sasaran bom dan mengenai kedubes RRC di Yugoslavia. Akibatnya demonstrasi besar-besaran dilakukan mahasiswa China dengan melempari batu ke kedubes AS.

¹⁵ Beberapa kebijakan yang diterapkan Deng Xiaoping seperti penghapusan monopoli negara dalam pembelian hasil panen, badan-badan Swasta diijinkan beroperasi dan terbukanya modal asing di Cina.

¹⁶ Van Ness juga menjelaskan bahwasannya selama sepuluh tahun (1972-1982) Cina dan AS secara periodik membangun prinsip bersama dengan tiga persetujuan yaitu: *Shanghai Communiqué* (1972), ditandatangani oleh Presiden Nixon dan PM Cina Zhou Enlai, *The Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations* (1979) dibawah pemerintahan Jimmy Carter, dan terakhir *US-China Joint Communiqué on US Arms sales to Taiwan* (pada pemerintahan Reagan).

Taiwan dengan Cina menjadikan jalan bagi AS untuk tidak memperluas kekuasaan Cina. Begitupun saat pergolakan di Tibet, dimana Tibet ingin memisahkan diri dari Cina. Dengan berbagai persoalan ini, AS berharap dapat menghambat laju perkembangan Cina.

4.3.1 Perkembangan Perekonomian Cina dan 123 Agreement

Reformasi perekonomian Cina mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tajam. Setiap negara pastinya ingin aktif dalam permainan politik global ekonomi. Dari tahun 1978-1995, GDP tumbuh 8% menurut statistik versi Cina atau 6,8% menurut versi Bank Dunia.¹⁷ Ekonomi Cina mengalami pertumbuhan rata-rata 10% tiap tahun selama periode 1990-2004, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi didunia.¹⁸ Dan jika kita melihat pertumbuhan ekonomi Cina tahun-tahun terakhir yang terus meringkat, merupakan suatu bukti nyata bangkitnya Cina. Berikut adalah GDP berdasarkan data CIA tahun 2006-2008:

4.1 Tabel GDP AS, Cina, India, Jepang
Tahun 2006-2008

Tahun	Negara	Gross Domestic Product			
		Purchasing Power Parity	Official exchange rate	Real Growth	Perkapita (PPP)
2008	AS	\$14.29 triliun	\$14.33 triliun	1,3%	\$47.000
	Cina	\$7.8 triliun	\$4.222 triliun	9,8%	\$6,000
	India	\$3.267 triliun	\$1.237 triliun	6,6%	\$2,800
	Jepang	\$4.348 triliun	\$4.844 triliun	-0,40%	\$34,200
2007	AS	\$14.11 triliun	-	2%	\$46,400
	Cina	\$7.104 triliun	-	13%	\$5,500
	India	\$3.065 triliun	-	9%	\$2,700
	Jepang	\$4.365 triliun	-	2,4%	\$34,300
2006	AS	\$13.83 triliun	-	2,8%	\$46,300
	Cina	\$6.475 triliun	-	11,6%	\$4,900
	India	\$2.812 triliun	-	9,6%	\$2,500
	Jepang	\$4.263 triliun	-	2%	\$33,400

Sumber: CIA, "China", <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/CH.html>, diakses tanggal 21 Juni 2009.

¹⁷A.Zaenurrofik, *China Naga Raksasa Asia: Rahasia Sukses China Menguasai Dunia*. (Yogyakarta: Garasi, 2008), 130.

¹⁸Ibid, 136.

GDP (*purchasing power parity*) Cina menempati urutan ketiga dunia setelah Uni Eropa dan AS.¹⁹ Namun yang utama dilihat adalah GDP *Real Growth*, atau pertumbuhan nyata suatu negara. Selama tiga tahun terakhir peningkatan yang dicapai Cina sangat tinggi dan hampir tidak dipengaruhi situasi perekonomian dunia yang sedang melambat. Bentuk pola perekonomian terdahulu selalu dipengaruhi oleh AS dan negara-negara sekutunya seperti Jepang dan Uni Eropa. Dengan kata lain perekonomian suatu negara (khususnya bagi Cina dan India) tidak lagi tergantung pada stabilitas perekonomian AS. Fenomena ini dikenal dengan *de-coupling*.²⁰ Lambatnya pertumbuhan ekonomi AS saat ini disebabkan krisis yang terjadi di AS sejak tahun 2007, sebagai catatan penting Cina merupakan negara dengan surplus terbesar di dunia, dan exporter terbesar kedua di dunia (jumlah tenaga kerja yang berlimpah dengan upah yang rendah menjadikan Cina sebagai produsen barang yang murah). Cina juga pemegang 30% atau sekitar US\$2 triliun lebih dari total 6,8 triliun cadangan devisa global tahun 2008.²¹

Ferguson (2005) berangapan bahwa stabilitas sistem moneter internasional saat ini tidak stabil dibandingkan pada masa sebelum PD-I, dan putaran globalisasi secara perlahan akan tenggelam karena kebijakan-kebijakan AS yang berlebihan (*imperial overstretch*). Terlebih lagi munculnya kekuatan baru yakni Cina.²²

...great-power rivalry. It is true that the Chinese have no obvious incentive to pick a fight the United State. But China's ambitions with respect to Taiwan are not about disappear just because Beijing owns a stack to play the

¹⁹ GDP(PPP) atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Fungsi PPP untuk mengukur seberapa banyak sebuah mata uang dapat membeli (dalam dollar AS). PPP dipakai untuk perbandingan internasional dari standard hidup

²⁰ Biro Humas dan TU Pimpinan Bapenas, "Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi AS", www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2625/; Internet, Diakses tanggal 22 Juni 2009.

²¹ Sri Hartati Samahadi, "Fokus: Kudeta di Percepat Terhadap Hegemoni AS?", *Kompas*, 19 Juni 2009, Hal 45.

²² Lebih jauh ferguson menggambarkan selain dari aktivitas yang terlalu berlabihan dari negara kuat (AS) *imperial overstretch*, ada factor lainnya yaitu pertikaian/konfrotasi antara pusat kekuasaan dan ketidakstabilan dari aliansi, munculnya organisasi teroris yang anti-kapitalisme, dan negara-negara yang mensponsori terorisme.

nationalist card by threatening to take over its errant province. Would the United States really be willing to fight China Over Taiwan, as it has Pledged in the past to do? And what would happen if the Chinese authorities flexed their new financial muscles by dumping U.S bonds on the world market?...

Ferguson juga memperingatkan bahwa saat ini negara-negara dunia ketiga (miskin) berkembang menjadi negara kreditor bagi kapitalis, dan Cina menjadi kreditor AS yang terbesar. Lebih lanjut Ferguson (2007) mengemukakan dua alasan: yang pertama karena jumlah tenaga kerja dengan upah yang murah, menaikkan tingkat pengembalian modal dan yang kedua adalah naiknya tingkat pengembalian modal, biaya malah turun. Pendapatan Cina yang besar digunakan untuk membeli obligasi pemerintah AS yang berpendapatan rendah, secara tidak langsung telah menekan suku bunga AS dan dunia.

Suatu kenyataan lainnya adalah disatu sisi AS memerlukan Cina sebagai patner namun disisi lain AS harus mengantisipasi agar kekuatan yang dimiliki Cina tidak menghancurkan Super Power AS. Penting bagi AS mempertahankan hegemoni dan dominasinya didunia. Krisis ekonomi AS saat ini yang memicu gagasan (khususnya anggota SCO) untuk menggantikan mata uang global dollar.²³ Bagi Cina, dengan situasi perekonomian AS saat ini (dengan beban utang nasional yang sangat besar) ditakutkan cadangan anggaran belanja Cina akan digunakan untuk membantu pemulihan perekonomian AS. Untuk itu Cina mengambil menjadikan momentum ini untuk menonjolkan diri sebagai kekuatan yang dapat mengeser posisi AS, salah satu cara dengan mengajukan usulan pergantian mata uang global. Jika sampai Dollar terancam dipastikan AS akan terancam (dollar tidak akan lagi mempengaruhi kondisi moneter negara-negara lain).

Negara yang kuat secara ekonomi atau menguasai atau "mengontrol" perekonomian disebut negara superpower, jika kekuatan ini semakin terkikis maka pengaruh negara kuat akan semakin berkurang. Untuk itulah AS membangun India untuk menyaingi India agar Cina tidak menjadi superpower

²³ Dalam pertemuan SCO awal Juni 2009 di Rusia, agenda utamanya ialah membahas pengantian dollar AS. Keuntungan AS sebagai mata uang Internasional yang digunakan untuk berbagai transaksi perdagangan ialah AS dapat mencetak uang dan penerbitan surat utang pada suku bunga yang relative lebih rendah dari pada negara lain.

tunggal di wilayah Asia dan jangka panjang didunia. Salah satu cara AS ialah menekankan India agar tidak menghadiri SCO (*Shanghai Cooperation Organization/Organisasi Kerjasama Shanghai*) di shanghai pada bulan Juni 2006. Hal ini merupakan salah satu bentuk penekanan AS terhadap Cina²⁴. Cina beranggapan bahwa ketidakhadiran India merupakan kompromi antara AS dan India untuk menghambat perkembangan Cina.²⁵ AS memandang SCO sebagai kerjasama yang strategis yang dapat mengimbangi AS dalam perebutan daerah pengaruh (*shere of influence*) di kawasan dunia. Dengan kata lain SCO merupakan ancaman ekonomi, militer dan keamanan. Salah satu cara yang dilakukan AS agar India tidak menghadiri SCO dengan perjanjian kerjasama yaitu pengembangan *project seabird*. Proyek ini merupakan pengembangan pangkalan udara, gudang persenjataan, peluru kendali dan panagakalan laut di karwar dengan total biaya US\$13 milyar.²⁶

Kemajuan dibidang ekonomi otomatis meningkatkan peningkatan dibidang lainnya (yang paling strategis adalah teknologi dan militer). Dalam bidang pertahanan Cina memiliki pasukan tentara terbesar didunia. Angkatan bersenjata Cina dikenal dengan *People Liberation Army (PLA)* atau Tentara Pembebasan Rakyat (berjumlah 2,3 juta pada tahun 2003). Anggaran pembelajaan militer Cina mencapai US \$56 milyar, terbesar ketiga didunia setelah AS (lebih dari US \$400 milyar) dan Rusia pada tahun 2006.²⁷ Pada tanggal 15 Maret 2007, dalam sidang ke-5 Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-10, diumumkan bahwa anggaran militer China pada tahun 2007 sebesar 350.92 miliar Yuan atau sekitar US \$44.94 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 17,8% dari tahun

²⁴ SCO adalah Organisasi Internasional antar pemerintahan yang didirikan di Shanghai 15 Juni 2001 oleh 6 negara; Cina, Rusia, Kazakhtan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan. Kerjasama strategis yang dipelopori oleh Rusia dan Cina untuk mengalang kerjasama diantara Negara-Negara Asia Tengah.

²⁵ South Asia Analysis Group, "China and The 123 Agreement: An Update 12 Agustus 2007", paper no 2330, Dalam, <http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers24%5Cpaper2330.html>; Internet, Diakses Tanggal 7 Desember 2008.

²⁶ Hendrajit, "Indonesia Perlu Dorong Kerjasama Strategis ASEAN-SCO", Dalam http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=10768; Internet, Diakses Tanggal 27 Mei 2006.

²⁷ *Op.Cit.* A.Zaenurrofik.

2006.²⁸ Upaya Cina dalam memaksimalkan kemampuan militernya dengan pemenuhan peralatan militer dengan pemberdayaan dan pembinaan terpusat industri militer (pembuatan peralatan militer di negaranya sendiri). Walaupun saat ini kekuatan militer Cina memang belum sekuat AS tapi pengarahannya pembentukan kekuatan kearah yang lebih kuat jelas terlihat. Cina berambisi untuk tampil sebagai kekuatan politik dan militer khususnya dikawasan Asia Pasifik.²⁹ Pengembangan kekuatan di Cina lebih difokuskan pada angkatan laut dan udara. Jika kekuatan Militer Cina dapat menguasai Asia Pasifik maka ancaman bagi wilayah Jepang, Korea Selatan dan India dan ini berarti ancaman bagi kepentingan AS. Dengan hal tersebut maka Cina dapat memainkan peranan penting dalam menentukan pola-pola realiansi di kawasan, dan memiliki insentif kuat dalam memainkan politik perimbangan kekuatan dikawasan.³⁰

Upaya lain Cina untuk pertumbuhan kekuasaannya dengan pengembangan program antariksa. Cina telah berhasil meluncurkan pesawat antariksa Shenzou 5 dan 6 (program-program ini kemungkinan dapat dipergunakan untuk keperluan militer). Cina juga masuk dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO) dan Organisasi internasional lainnya. Hal ini dimaksudkan agar Cina dapat memasukan kebijakan maupun keputusan untuk kepentingannya. Presiden Cina Hu Jintao dalam pidatonya pada kongres ke-17 Partai Komunis Cina menyatakan bahwa Cina harus mengembangkan kemampuan militer berteknologi tinggi.

²⁸ Ibid.

²⁹ Wilayah Asia Pasifik mencakup pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, Australia dan negara di laut Pasifik. Kawasan ini banyak terjadi pergolakan seperti masalah bajak laut, terorisme, penyebaranluasan senjata pembunuh massal dll. Dalam artikel peningkatan anggaran militer cina tahun 2007 yang dibuat Mah (<http://militerium.com/latest/peningkatan-anggaran-militer-cina.html>), ia menggambarkan bahwasannya peningkatan anggaran ini untuk mendukung strategi dan doktrin militer yang baru, antara lain strategi angkatan laut yang diproyeksikan dari *Green Water Navy*, menjadi *Blue Water Navy*. Konsep *Blue Water Navy*, peningkatan kemampuan Tentara Laut Cina agar dapat diproyeksikan disepanjang rantai kepulauan pertama (Aleutian, Kurile, Ryukyu, Taiwan, Philipina, dan kepulauan sunda besar) pada awal abad 21. Diperkirakan pada tahun 2020 Tentara Laut Cina dapat mengerahkan armadanya menjadi nomor dua di Asia Timur setelah gabungan AS dan Jepang. Modernisasi tidak hanya dilakukan di laut dan udara saja, juga di darat. Modernisasi Pasukan Darat (PLA) diperkirakan berjumlah 285.000.

³⁰Pikiran Rakyat Online, "Kemampuan Militer Cina Cemaskan AS", dalam <http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=15748>; Internet, diakses tanggal 24 Juni 2009.

Zaenurrofik menggambarkan dibidang nuklir, Cina memberikan perhatian yang cukup besar khususnya disepanjang pantai tenggara. Cina akan membangun 40 pembangkit tenaga atom menjelang 2020 dan menjadi 100 menjelang tahun 2050. Cina menggunakan konsep pembangkit cepat (seperti Korea Selatan dan Jepang). Berdasarkan data *Nikkei Weekly*, 13 Maret 1995, Cina akan mendirikan pabrik percontohan pemrosesan kembali yang mampu memproses 100 ton bahan bakar bekas setiap tahunnya. Hal ini berarti meningkatkan akumulasi plutonium yang digunakan sipil di Asia melebihi kontrol internasional. Cina juga berhasil mengembangkan infrastruktur litbang dan fasilitas rancang bangun, pembuatan dan pengujian dan pabrik sistem rudal taktis, kendaraan peluncur luar angkasa dan pesawat ruang angkasa. Berdasarkan *the Atomic scientist* dalam buku tahunan SIPRI (*The Stockholm International Peace Research Institute*) edisi 1999, kekuatan arsenal nuklir Cina sekitar 400 *warheads*. Delivery sistem nuklir Cina terutama berdasar *surface-to-surface ballistic missile*, ditambah sejumlah kecil *sea-based system (subprime-launched ballistic missile, SLBM)*. Rudal balistik Cina terdiri dari *short-range theatre missile* sampai *intercontinental ballistic missiles (ICBMs)*. Dalam teknologi ruang angkasa Cina melakukan investasi besar dan sudah berhasil meluncurkan lebih dari 50 satelit telekomunikasi, *remot sensing, earth observation*, dan keperluan navigasi. Cina juga telah berhasil melakukan penerbangan manusia ke luar angkasa pada tahun 2005. negara ini memiliki tiga kompleks peluncuran pesawat ruang angkasa, dua pusat pengendalian penerbangan ruang angkasa, dan *global space tracking network* yang mencakup daratan Cina, Pasifik Selatan, Asia selatan, Afrika dan Atlantik.³¹

Dari berbagai data diatas dapat kita lihat kekuatan Cina yang terus meningkat. Sumberdaya yang besar ditambah dengan teknologi dan sistem yang diberlakukan di Cina memberikan kekhawatiran bagi negara besar. Dengan mengutip apa yang di katakan Napoleon Bonaparte pada awal abad ke-19, Charles W.Kegley dan Eugene R. Wittkopf juga menggambarkan bahwasanya dunia seharusnya membiarkan Cina terlelap ("*let China Sleep*") karena dalam prediksi

³¹ Mah, "Peningkatan Militer Cina", dalam <http://militerium.com/latest/peningkatan-anggaran-militer-cina.html>; Internet,

Napoleon ketika Cina terbangun/bangkit dunia akan terguncang (*"the world will tremble"*), dan saat ini Cina telah bangkit. Langkah pertama Cina menguasai Asia (kawasan terbesar didunia) dan selanjutnya menguasai dunia.

4.3.2 Hubungan Cina-India dan Posisi Amerika

Populasi penduduk India dan Cina yang sangat besar merupakan potensi persaingan strategis bagi kedua negara. Pengaruh India di kawasan Asia menjadikan potensi ancaman bagi Cina, demikian sebaliknya. Persoalan perbatasan di Tibet, dan dukungan militer serta ekonomi Beijing terhadap Pakistan (termasuk persoalan kasmir) membuat hubungan India-Cina tidak harmonis. Persaingan memperebutkan patner dagang dan sumber energi untuk perkembangan ekonomi semakin memperlebar masalah diantara mereka.

Pada tahun 2003, Perdana Menteri Cina Vajpayee berkunjung ke Beijing dengan harapan meningkatkan hubungan baik antara keduanya. Tahun 2004, pemimpin pasukan tentara India mengunjungi Beijing untuk mendiskusikan kerjasama pertahanan untuk pertamakalinya. Dan semenjak Perdana Menteri Cina Wen Jiabao mengunjungi India, telah terjadi penandatanganan 11 kesepakatan dan berjanji akan membina *"strategic patnership"* termasuk daerah perbatasan dan upaya memperluas hubungan ekonomi.³² Upaya Cina merangkul India sebenarnya juga telah dilakukan setelah kunjungan dari Clinton ke India. Li Peng berkunjung ke New Delhi untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Dalam kesempatan ini Li Peng mengatakan:

Tujuan dari kunjungan saya adalah untuk meningkatkan kepercayaan, mempererat persahabatan dan meningkatkan kerjasama." "Cina tidak pernah menganggap India sebagai ancaman, dan Cina tidak pernah bermaksud untuk memberikan ancaman bagi India", "Kami setuju bahwa Cina dan India masih kurang saling pengertian satu sama lain, untuk mencapai pemahaman dan kepercayaan yang lebih baik adalah tugas utama dalam hubungan bilateral kami". Cina tidak mencari berbagai

³² "India, Cina Hoping to Reshape The World Order Together" *Washington Post*, 12 April 2005, dalam K.Alan Kronstadt, *CRS Report for Congress:India-U.S. Relation, Update 12 Agustus 2008*, hal 22.

macam hegemoni, dan Cina menginginkan India untuk memainkan peranan yang lebih aktif pada urusan regional maupun internasional.”, ”Cina bermaksud untuk mengembangkan hubungan ketetanggan dan persahabatan dengan seluruh negara-negara di Asia Selatan,” ”Cina tentunya berharap untuk melihat perdamaian, stabilitas dan perkembangan yang terus menerus, dalam kawasan dimana seluruh negara dapat memperlakukan negara lain dalam kesetaraan, hidup dalam harmony dan mencoba memperbaiki perselisihan secara damai dengan berdialog. Cina mendukung seluruh upaya yang berkaitan dengan perdamaian dan stabilitas di Asia selatan dan juga mendukung proses kerjasama regional. Cina menentang hegemonisme dan tidak akan pernah mencari hegemoni.³³

Namun India lebih mengarah pada AS, dengan memanfaatkan peluang kerjasama nuklir sipilnya. Beberapa analisis India, juga menghawatirkan klaim wilayah Cina dan kehadiran militer Cina di wilayah India dan menganggap Cina adalah provokator.³⁴ Untuk itu India membangun infrastruktur di daerah sengketa perbatasan dengan menyebarkan dua *new mountain divisioni*, selama delapan tahun. Sekitar bulan Mei 2008, Cina membuat pangkalan *submarine* nuklir di pulau Hainan, Laut Cina Selatan dan ini adalah pertanda bahaya bagi India. Letak Hainan 1.200 Mil dari daerah strategis vital Selat Malaka. Bagi India hal ini merupakan ancaman di daerah bagian timur India. Rasa tidak percaya India pada Cina adalah peluang bagi AS. Sehingga pada bulan September 2008 AS dan India melakukan latihan bersama angkatan laut di Samudera India. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan AS dalam rangka membantu perkembangan Cina dibidang militer khususnya. Penandatanganan *123 Agreement* 10 Oktober 2009 juga salah satu bentuk upaya AS menunjukkan ”keseriusan” dalam menjalin kerjasama dengan India. Kebangkitan Cina dan India yang ”rukun” merupakan kebangkitan Asia dan dapat menghilangkan kekuatan hegemoni bagi yang lainnya.

³³Op.Cit Osolihin.

³⁴Op.Cit, *CRS Report for Congress*, hal 24.

BAB V

KESIMPULAN

123 Agreement merupakan bentuk pemenuhan kepentingan nasional AS. AS membuat kesepakatan *123 Agreement* untuk melegalkan kerjasama India-AS, karena jika menurut NPT, AS tidak boleh melakukan kerjasama dengan negara *non-NPT*. *123 Agreement* dikatakan pragmatis jika tujuan akhir dari kesepakatan ini berhasil. Satu kesepakatan Antara AS dan India namun memberikan kontribusi yang berlipat ganda bagi AS. Dasar kepentingan AS ini didasarkan dalam suatu model pengambilan keputusan, dan bertindak merupakan ciri AS sebagai negara yang Pragmatis. India menjadi penting bagi stabilitas perekonomian, keamanan dan pemenuhan energi AS atau dikatakan sebagai negara yang akan mewujudkan kepentingan nasional AS. Ketersediaan energi alternatif dapat merubah pola ketergantungan AS pada bahan bakar fosil. Dengan energi nuklir yang murah, dan menghasilkan energi yang besar AS dapat meningkatkan perekonomian, keamanan, sehingga diharapkan situasi politiknya akan lebih stabil. Energi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap Individu. Kekurangan Energi berarti kehancuran suatu negara.

Ada beberapa alasan mendasar yang menjadikan kesepakatan nuklir sipil India-AS sangat penting bagi AS. Kekuatan Cina semakin kuat dan India dijadikan penyeimbang kekuasaan. Cina masih merupakan negara komunis meskipun sistem perekonomiannya sudah kapitalis. Sebagai salah satu anggota *nuclear club*, Cina mempunyai hak yang sama seperti AS sebagai *nuclear state* yang dapat membangun persenjataan nuklir. Perekonomian Cina yang terus meningkat, dan menguasai pasar dunia berarti Cina mempunyai pengaruh besar dalam menentukan suatu kebijakan dalam perdagangan internasional. kekuatan ekonomi Cina secara otomatis meningkatkan anggaran pertahanan militer Cina. Dalam beberapa tahun terakhir perubahan dalam militer Cina membuat kekhawatiran bagi AS dan negara sekutunya. Cina memiliki pasukan tentara terbanyak di dunia yang dapat dikerahkan untuk menguasai daerah-daerah tertentu yang mengalami perseteruan (seperti Taiwan ataupun Tibet). Anggaran militer

Cina juga sangat tinggi. Dalam persenjataan Cina dapat memperbaharui dan membuat persenjataan nya sendiri. Kebangkitan Cina dalam bidang antariksa terlihat ketika negara ini meluncurkan berbagai macam satelit untuk kepentingan telekomunikasi maupun militer. Ambisi Cina untuk tampil sebagai kekuatan politik, militer dan ekonomi dikawasan Asia pada langkah pertama dan menjadi kekuatan global nantinya harus secepatnya diantisipasi. Kebesaran Cina akan menghilangkan kekuatan AS nantinya. Untuk itu AS harus mencari cara untuk mempertahankan diri sebagai satu-satunya negara adidaya yang menguasai dunia salah satu cara nya melalui kesepakatan nuklir sipil AS-India. *123 Agreement* menjadikan India lebih leluasa mengembangkan nuklir sipil maupun nuklir militer. Pengimbangan kekuasaan ini ditujukan agar Cina tidak terlalu berkuasa penuh di wilayah Asia.

Amerika memilih India karena secara kualitas India mampu mengimbangi Cina. Jumlah penduduk India dan Cina yang relatif tidak jauh berbaeda, perekonomian India dalam jangka beberapa tahun mengalami peningkatan yang baik dan diharapkan menjadi lebih besar, dan memiliki persenjataan nuklir. India sudah memiliki ahli-ahli/ilmuwan maupun teknologi nuklir yang memungkinkan diajak bekerjasama membangun nuklir sipil. India adalah negara demokrasi, dan dalam sejarahnya militer India tidak pernah ikut campur dalam pengembangan senjata nuklir. Kerjasama ini secara tidak langsung juga mengikat India karena India tidak boleh lagi melakukan percobaan tes nuklir. Berdasarkan *123 Agreement*, India harus mengizinkan IAEA mengawasi program nuklir sipil. Meskipun program nuklir militer tidak wajib diperiksa oleh IAEA namun secara tidak langsung IAEA dapat memantau perkembangan senjata nuklir India.

India merupakan salah satu pencetus anggota *non-block*, dan kebanyakan dari anggota *non-block* mendukung pengembangan program nuklir damai Iran. Pada Tahun 2005 sebelum terjadinya kesepakatan antara AS-India, India mendukung program nuklir damai Iran. Namun setelah pernyataan perjanjian AS-India, India harus mendukung AS untuk menghentikan pengembangan nuklir damai. Secara geografis Iran terletak di sebelah barat India, berbatasan dengan Pakistan. Untuk itu India diperlukan sebagai tempat pangkalan AS sewaktu-waktu